

**Pengaruh Kualitas Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sijunjung
(Studi Kasus Pada BKAD Kabupaten Sijunjung)**

Skripsi



Nama : EDI KURNIAWAN

Nim : 222013261

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

2017

**Pengaruh Kualitas Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sijunjung
(Studi Kasus Pada BKAD Kabupaten Sijunjung)**

Skripsi

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



Nama : EDI KURNIAWAN

Nim : 222013261

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
TAHUN 2017**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Edi Kurniawan

Nim : 222013261

Jurusan : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi dengan peraturan yang ada.

Palembang, januari 2017



Edi Kurniawan

Motto :

“Berjuanglah Sampai Akhir Batasmu, Hadapi Semua Rintangan Yang Ada, Jangan Putus Asa, Karena ALLAH Sesungguhnya Tidak Menyukai Hambanya Yang Mudah Putus Asa, Jika Gagal Bangkit Lagi, Karena Kegagalan Adalah Kesuksesan Yang Tertunda Dan Kesuksesanmu Di Tunggu Kedua Orang Tua Dan Keluarga”

**“REMEMBER ALLAH ALWAYS WITH ME
AND DON'T AFRAID OF EVERYTHING,
NOTHING IS IMPOSSIBLE**

Dengan Cinta Dan Do'a

Ku Persembahkan Skripsi Ini Khusus

Kepada :

- ❖ Allah SWT Atas Ridhonya
- ❖ Rasulullah Ku Muhammad SAW
- ❖ Imam Ku AL-QUR'AN
- ❖ Kedua Orang Tua, Uda, UniAdik” Ku & Pacar
- ❖ Keluarga Ku Tercinta
- ❖ Pak M̄ Basyarudin R,SE.,M.Si.,Ak.,CA
- ❖ Pak Mizan,SE.,M.Si.,Ak
- ❖ Ibuk Lis Djuniar,SE.,M.Si
- ❖ Seluruh Dosen Universitas Muhammadiyah Palembang
- ❖ Almamaterku Yang Sangat Aku Banggakan

Teman-Teman, BKAD Kabupaten Sijunjung Dan Sahabat Seperjuanganku

PRAKATA

Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya yang melimpah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG (Studi Kasus Kantor BPKAD Kabupaten Sijunjung) yang merupakan persyaratan dalam mencapai gelar sarjana dalam ilmu Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang. Isi skripsi ini berisi tentang bagaimana Pengaruh Kualitas Sistem Pengendalian Intern Terhadap Laporan Keuangan Pemda Kabupaten Sijunjung, Dalam penelitian ini pengaruhnya adalah secara signifikan, data yang diperlukan yaitu data primer dan sekunder serta metode penelitian nya menggunakan kuisisioner dan dalam penelitian ini jenis penelitiannya adalah penelitian asosiatif. Penulis menyadari bahwa penyajian skripsi ini secara teknis dan materi masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi dengan kemampuan yang penulis miliki maka penulis mencoba untuk menyusun skripsi ini dengan sebaik-baiknya dan besar harapan agar skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya khususnya mahasiswa/i Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang. Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. ALLAH SWT
2. Kedua Orang Tua Ku
3. Bapak DR. Abid Djazuli S.E.,M.M, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf
4. Bapak Drs. Fauzi Ridwan,M.M, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf
5. Bapak Betri Sirajuddin, S.E.,M.Si.,Ak.,CA selaku Ketua Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang
6. Bapak M Basyarudin R,SE.,M.Si.,Ak.,CA selaku ketua penguji yang baik dan memberikan bimbingan disaat skripsi hingga bisa lulus.
7. Bapak Mizan,S.E.,M.Si.,Ak selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan sabar membimbing, mendidik, dan memberikan arahan serta masukan yang amat berguna sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

8. Ibuk Lis Djuniar, S.E., M.Si selaku dosen pembimbing akademik yang sabar memberi bimbingan dalam pemilihan mata kuliah.
9. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan bisnis yang telah mengajarkan ilmunya dan memberikan nasihat-nasihat yang membuat penulis termotivasi untuk semangat belajar serta seluruh staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang membantu kelancaran dalam mengurus administrasi.
10. Kedua Orang Tuaku tercinta Serta kakak, Ayuk dan Adik-Adiku.
11. Serta pihak-pihak yang bersangkutan yang tidak bisa ku persebutkan satu persatu

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca dan berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini, atas perhatian dan masukan saya ucapkan terima kasih.

Palembang, januari 2017

Edi Kurniawan

DAFTAR ISI

Halaman

| | |
|---|----------|
| SAMPUL JUDUL | i |
| HALAMAN JUDUL..... | ii |
| HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO | v |
| HALAMAN PRAKATA | vi |
| HALAMAN DAFTAR ISI | viii |
| HALAMAN DAFTAR TABEL..... | x |
| HALAMAN DAFTAR GAMBAR | xi |
| HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN..... | xii |
| ABSTRAK..... | xiii |
| ABSTRACK..... | xiv |
| | |
| BAB I. PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan Penelitian | 8 |
| D. Manfaat Penelitian | 8 |
| BAB II. KAJIAN PUSTAKA..... | 9 |
| A. Grand Theory | 9 |
| B. Teori Kontijensi | 9 |
| C. Penelitian Sebelumnya | 21 |
| D. Landasan Teori..... | 23 |
| 1. Sistem Pengendalian Intern..... | 23 |
| 2. Laporan keuangan peemerintah | 25 |
| 3. Kualitas laporan keuangan | 27 |
| 4. Peranan laporan keuangan..... | 28 |
| 5. Tujuan laporan keuangan | 28 |
| 6. Manfaat implementasi UU No.71 tahun 2010 | 32 |
| 7. Keterkaitan Kualitas SPI Terhadap | |

| | |
|---|-----------|
| Kualitas Laporan Keuangan..... | 37 |
| E. Karangka Pemikiran..... | 38 |
| F. Hipotesis..... | 41 |
| BAB III. METODE PENELITIAN..... | 43 |
| A. Jenis Penelitian..... | 43 |
| B. Lokasi Penelitian..... | 43 |
| C. Operasionalisasi Variabel..... | 43 |
| D. Populasi dan Sampel..... | 46 |
| E. Data yang Diperlukan..... | 46 |
| F. Metode Pengumpulan Data..... | 46 |
| G. Analisis Data dan Teknik Analisis..... | 47 |
| 1. Analisis Data..... | 47 |
| 2. Teknik Analisis..... | 48 |
| BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 53 |
| A. Hasil Penelitian..... | 53 |
| B. Pembahasan Hasil Penelitian..... | 87 |
| BAB V. SIMPULAN DAN SARAN..... | 90 |
| A. Simpulan..... | 90 |
| B. Saran..... | 90 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

| | |
|---|----|
| Tabel I.1 Perkembangan Opini BPK Wilayah Sumatera Barat..... | 6 |
| Tabel III.1 Penelitian Sebelumnya..... | 23 |
| Tabel II.1 Operasionalisasi Variabel | 45 |
| Tabel IV.1 Gambaran Umum Responden..... | 47 |
| Tabel IV.2 Hasil jawaban Responden | 64 |
| Tabel IV.3 Rekap jawaban responden variabel SPI Lingkungan Pengendalian | 66 |
| Tabel IV.4 Penilaian Resiko..... | 67 |
| Tabel IV.5 Kegiatan Pengendalian..... | 69 |
| Tabel IV.6 Informasi dan komunikasi..... | 70 |
| Tabel IV.7 Pemantauan | 71 |
| Tabel IV.8 Rekap Jawaban Kuisisioner Variabel Kualitas lap. Keuangan Relavan | 72 |
| Tabel IV.9 Andal | 73 |
| Tabel IV.10 Dapat dibandingkan..... | 74 |
| Tabel IV.11 Dapat dipahami..... | 75 |
| Tabel IV.12 Hasil pengujian Validitas Variabel SPI..... | 76 |
| Tabel IV.13 Hasil pengujian Validitas Variabel Kualitas laporan keuangan..... | 77 |
| Tabel IV.14 Hasil Uji Reliabilitas | 78 |
| Tabel IV.15 Hasil Uji Normalitas..... | 80 |
| Tabel IV.16 Hasil Pengujian Autokorelasi..... | 81 |
| Tabel IV.17 Hasil Uji Heterokedastitas..... | 82 |
| Tabel IV.18 Hasil Uji Koefisien Determinan..... | 83 |
| Tabel IV.19 Hasil Uji Regresi Sederhana..... | 84 |
| Tabel IV.20 Hasil Uji T (Parsial) | 85 |

DAFTAR GAMBAR

Halaman

| | |
|-----------------------------------|---|
| Tabel I.1 Karangka Pemikiran..... | 6 |
|-----------------------------------|---|

DAFTAR LAMPIRAN

Biodata Penulis

Pengesahan Skripsi

Kuisisioner

Sertifikat Toefel

Sertifikat AIK

Surat Keterangan Melunasi BPP

Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi

Surat Keterangan Penelitian

Piagam KKN

Piagam Komputer

ABSTRAKSI

Edi Kurniawan/222013261/Akuntansi/2017/Pengaruh Kualitas Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Sijunjung

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Populasi dalam penelitian ini adalah 76 pegawai yang ada BPKAD Kabupaten Sijunjung (sumatera barat). Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui kuesioner. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sijunjung. Koefisien determinasi menunjukkan besarnya pengaruh sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap terhadap kualitas laporan keuangan adalah sebesar 48,4% dengan tingkat cukup baik.

Kata kunci: pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan

ABSTRACT

Edi Kurniawan/222013261/Accounting/2017/Pengaruh Kualitas Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Sijunjung

This research is aimed at determining whether or not there was significant influence of the quality of the internal control system of financial reporting information. The population in this study were 76 employees of BPKAD Sijunjung (West Sumatera). The data used were primary data obtained through questionnaires. To analyze the data, the researcher used simple regression analysis. The results showed that the system of internal control had significant influence toward the quality of the Government's financial statements Sijunjung. The determination coefficient showed that the system of internal control had significant influence toward the quality of financial reporting of 48.4% in a pretty good rate

Keywords: influence of internal control system of the quality of financial statements

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam rangka memenuhi kewajibannya memberikan pertanggung jawaban publik adalah menyediakan informasi mengenai kinerja pemerintah daerah kepada para pemangku kepentingannya (stakeholder). Pemangku kepentingan yang utama adalah masyarakat dan dewan legislatif daerah (DPRD) Sebagai perwujudan akuntabilitas, pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan. Sebagaimana di ungkapkan oleh Mardiasmo (2004: 36). Salah satu alat untuk memfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik adalah melalui penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang konfrensif.

Laporan keuangan tersebut pada dasarnya merupakan asersi atau pernyataan dari pihak manajemen pemerintah daerah yang menginformasikan kepada pihak lain. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama suatu periode pelaporan. Laporan keuangan mengandung informasi bagi pemakai yang berbeda-beda, seperti anggota legislatif, kreditor, karyawan dan masyarakat umum. Para pemakai laporan keuangan tersebut membutuhkan keterangan kebijakan akuntansi terpilih sebagai bagian dari informasi yang

dibutuhkan, untuk membuat penilaian, keputusan keuangan dankeperluan lainnya.

Permasalahan akuntabilitas publik bisa muncul apabila pemerintah daerah tidak mampu menyajikan informasi mengenai kinerja pemerintah secara relevan, handal, sederhana, dan mudah dipahami oleh masyarakat sebagai konstituennya. Disisi lain, permasalahan juga bisa muncul apabila masyarakat tidak memahami laporan kinerja yang disajikan oleh pemerintah. Terhadap kemungkinan ini, pihak penyaji laporan keuangan tidak bisa dengan serta merta menyalahkan masyarakat tidak mampu memahami laporan keuangan pemerintah, karena pada umumnya publik membutuhkan informasi yang sederhana dan langsung menyangkut kepentingan mereka.oleh karena itu, informasi yang terdapat di dalam Laporan KeuanganPemerintah Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai.

Informasi yang bermanfaat bagi para pemakai adalah informasi yang mempunyai nilai. Informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh parapemakai. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian,danpengambilan keputusan.

Informasi akuntansi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus mempunyai beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan.

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Untuk dapat bermanfaat bagi para penggunanya, laporan keuangan harus memiliki empat karakteristik kualitatif pokok, berdasarkan SAP (2010: 25) keempat karakteristik tersebut merupakan persyaratan normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki karakteristik tersebut yaitu dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat diperbandingkan.

Laporan keuangan harus menggunakan bahasa dan istilah yang dapat dipahami oleh para penggunanya agar tidak terjadi interpretasi yang salah atas laporan keuangan. Laporan keuangan harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam proses pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang relevan adalah laporan keuangan yang dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan membantu mereka untuk mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Laporan keuangan juga harus disajikan secara jujur dan wajar, bebas, dan tidak menyesatkan sehingga dapat diandalkan. Selain itu, laporan keuangan harus lengkap dan netral, tidak memihak kepada siapapun. Kemudian, laporan keuangan harus dapat dibandingkan antar periode maupun antar perusahaan agar pengguna dapat mengidentifikasi tren posisi dan kinerja keuangan perusahaan.

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan negara tersebut, pemerintah baik pusat maupun daerah wajib melaksanakan pengelolaan laporan keuangan yang handal, baik dan akuntabel, karena pada hakikatnya uang yang dikelola oleh pemerintah itu sendiri berasal dari masyarakat, oleh karena itu pengelolaannya harus dioptimalkan, dapat dipertanggungjawabkan serta mendatangkan manfaat bagi seluruh masyarakat.

Peneliti sebelumnya Anggraeni S Madjam tahun 2014 dengan judul Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Gorontalo. Koefisien determinasi menunjukkan besarnya pengaruh sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan adalah sebesar 63,8%.

Penelitian sebelumnya dilakukan juga oleh Tuti Herawati tahun 2014 dengan judul Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan keuangan Pemda Cianjur, hasil penelitiannya menunjukkan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pemda Cianjur sebesar 83%, secara persial , lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemda Cianjur.

Salah satu indikator kualitas akuntabilitas keuangan dilihat dari opini auditor eksternal (BPK) atas penyajian laporan keuangan pemerintah, yang

terdiri dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL), dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang komponennya meliputi: Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan, Laporan Perubahan Laba, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Opini BPK secara bertingkat terdiri dari: Tidak Wajar (TW), Tidak Memberikan Pendapat (TMP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan yang terbaik adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Menurut BPKP RI dampak dari diperolehnya opini selain WTP atas laporan keuangan pemerintah antara lain:

1. Kurangnya dukungan dan partisipasi masyarakat dalam menunjang keberhasilan program kerja pemerintah.
2. Timbulnya konotasi atau persepsi publik akan adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara atau daerah.

Pemberian opini atas laporan keuangan pemerintah daerah didasarkan pada pertimbangan atas:

1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah
2. Efektivitas Pengendalian Intern
3. Kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan
4. Pengungkapan yang lengkap

Tabel I.1
Perkembangan Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Di Wilayah Provinsi Sumatera Barat

| No | Nama Pemda | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|----|----------------------|------|------|------|------|------|
| 1 | Kab. Agam | WDP | WDP | WDP | WTP | WTP |
| 2 | Kab. Dharmasraya | WDP | WDP | WDP | WDP | WTP |
| 3 | Kab. Kep Mentawai | WDP | WDP | WDP | WDP | WDP |
| 4 | Kab. 50 Kota | WDP | WDP | WDP | WDP | WTP |
| 5 | Kab. Padang Pariaman | WDP | WDP | WDP | WDP | WTP |
| 6 | Kab. Pasaman | WDP | WDP | WDP | WDP | WTP |
| 7 | Kab. Pasaman Barat | WDP | WDP | WDP | WDP | WTP |
| 8 | Kab. Pesisir Selatan | WDP | WDP | WTP | WDP | WTP |
| 9 | Kab. Sijunjung | WDP | WDP | WDP | WDP | WDP |
| 10 | Kab. Solok | WDP | WDP | WDP | WDP | WDP |
| 11 | Kab. Solok Selatan | WDP | WDP | WDP | WDP | WDP |
| 12 | Kab. Tanah Datar | WDP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 13 | Kota Bukit Tinggi | WDP | WDP | WTP | WDP | WTP |
| 14 | Kota Padang | WDP | WDP | WTP | WTP | WTP |
| 15 | Kota Padang Panjang | WDP | WDP | WTP | WDP | WDP |
| 16 | Kota Pariaman | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 17 | Kota Payukumbuh | WDP | WDP | WDP | WTP | WTP |
| 18 | Kota Sawah Lunto | WDP | WDP | WDP | WDP | WTP |
| 19 | Kota Solok | WDP | WTP | WTP | WDP | WDP |

Sumber: *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan*

Belum diperolehnya opini WTP dari BPK menunjukkan bahwa pelaporan keuangan Pemerintah daerah masih belum sepenuhnya dapat diyakini kewajarannya oleh BPK yang disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain:

- a. Adanya kelemahan sistem pengendalian intern;
- b. Belum tertatanya barang milik negara/daerah dengan tertib;
- c. Tidak sesuainya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Penyajian laporan keuangan yang belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- e. Kelemahan dalam sistem penyusunan laporan keuangan;
- f. Kurang memadainya kompetensi SDM pengelola keuangan pada pemerintah daerah.

Berkaitan dengan latar belakang masalah yang telah disebutkan di atas peneliti tertarik untuk meneliti **Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sijunjung**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengaruh kualitas sistem pengendalian intern terhadap laporan keuangan Pemda Kabupaten Sijunjung?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas informasi laporan keuangan?

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, dapat menambah wawasan untuk khususnya mengenai masalah sistem pengendalian intern terhadap laporan keuangan.
2. Bagi Kabupaten, dapat menambah dan memperbaiki laporan keuangan dengan baik dimasa yang akan datang.
3. Bagi Almamater, menambah pengetahuan bagi pihak lain yang berkepentingan seperti untuk menjadi bahan penelitian lebih lanjut, terutama mengenai sistem pengendalian intern terhadap kualitas keuangan BPKAD.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Grand Theory

Teori kegunaan keputusan (*decision-usefulness theory*) informasi akuntansi menjadi referensi dari penyusunan kerangka konseptual *Financial Accounting Standard Boards* (FASB), yaitu *Statement of Financial Accounting Concepts* (SFAC) yang berlaku di Amerika Serikat. SFAC No. 8 merupakan salah satu dari serangkaian publikasi di FASB untuk akuntansi dan pelaporan keuangan yang mencakup dua bab kerangka konseptual baru yang menggantikan SFAC No.1, tujuan pelaporan keuangan oleh perusahaan bisnis, dan SFAC No.2, karakteristik kualitatif informasi akuntansi. SFAC No.8 dimaksudkan untuk menetapkan tujuan-tujuan dan konsep-konsep fundamental yang akan menjadi dasar untuk pengembangan akuntansi keuangan dan pedoman pelaporan agar cakupan yang ada dapat memenuhi kebutuhan para pengambil keputusan yang akan menggunakannya.

B. Teori Kontijensi (*Supporting Theory*)

Pendekatan teori kontijensi mengidentifikasi bentuk-bentuk optimal pengendalian organisasi di bawah kondisi operasi yang berbeda dan mencoba untuk menjelaskan bagaimana prosedur operasi pengendalian organisasi tersebut. Pendekatan kontijensi pada akuntansi manajemen didasarkan pada premis bahwa tidak ada sistem pengendalian secara universal selalu tepat untuk dapat diterapkan pada setiap organisasi, tetapi

hal ini tergantung pada faktor kondisi atau situasi yang ada dalam organisasi. Dilandasi dari penelitian Riyanto (2003) yang mengatakan perlunya penelitian mengenai pendekatan kontijensi dalam menguji faktor kontekstual yang mempengaruhi hubungan antara sistem pengendalian dengan kinerja, pada penelitian ini yang akan diuji adalah mengenai hubungan antara sistem pengendalian intern dan kualitas laporan keuangan.

Hasil penelitian penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang tidak konsisten antara satu peneliti dengan peneliti yang lainnya. Sehingga diperlukan upaya untuk merekonsiliasi ketidakkonsistenan dengan cara mengidentifikasi faktor-faktor kondisional antara kedua variabel tersebut dengan pendekatan kontijensi. Penggunaan pendekatan kontijensi tersebut memungkinkan adanya variabelvariabel lain yang bertindak sebagai *moderating variable* atau *intervening variable* yang mempengaruhi hubungan antara sistem pengendalian intern dan kualitas laporan keuangan.

1. Pelaporan Keuangan Pemerintah

Pelaporan keuangan meliputi segala aspek yang berkaitan dengan penyediaan dan penyampaian informasi keuangan. Aspek-aspek tersebut antara lain lembaga yang terlibat (misalnya penyusunan standar, badan pengawas dari pemerintah atau pasar modal, organisasi profesi, dan entitas pelapor), peraturan yang berlaku termasuk Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU). Laporan keuangan hanyalah salah satu medium dalam

penyampaian informasi. Laporan keuangan pada dasarnya adalah asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan

Tujuan pelaporan keuangan pemerintah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan: akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antar generasi. Evaluasi kinerja pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- 1) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- 2) Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.

- 3) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- 4) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- 5) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
- 6) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas suatu entitas pelaporan. Adapun laporan keuangan pokok yang harus disusun oleh pemerintah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan meliputi:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran

Menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan

perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Pelaporan mencerminkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap pelaksanaan APBD. Dengan demikian, laporan realisasi anggaran menyajikan pendapatan pemerintah daerah dalam satu periode, belanja, surplus atau defisit, pembiayaan dan sisa lebih atau kurang pembiayaan.

2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3) Neraca

Neraca adalah keuangan yang menyajikan posisi keuangan entitas ekonomi pada suatu saat (tanggal) tertentu. Laporan ini dibuat untuk menyajikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana.

4) Laporan Operasional

Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam laporan operasional terdiri dari pendapatan, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.

5) Laporan Arus Kas

Menyajikan informasi tentang sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas, selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi dan non-anggaran.

6) Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7) Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, dimana setiap pos dalam laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan arus kas, harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan. Disamping itu, juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam standar akuntansi pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

2. Kualitas Laporan Keuangan

Statement of Financial Accounting Concepts No. 8 tentang *Conceptual Frameworks for Financial Reporting* menyatakan bahwa informasi keuangan harus memiliki karakteristik kualitatif yang fundamental untuk menjadi berguna dalam pengambilan keputusan.

Para pembuat keputusan membutuhkan informasi untuk digunakan dalam keputusan investasi, kredit, dan keputusan yang serupa lainnya. SFAC ini diterbitkan oleh FASB pada tahun 2010. Karakteristik yang fundamental yaitu relevan (*relevance*) dan penggambaran yang senyatanya (*faithful representation*). Kegunaan dari informasi keuangan dalam laporan keuangan dapat ditingkatkan informasi tersebut mengandung nilai komparatif (*comparability*), dapat diverifikasi (*verifiability*), tepat waktu (*timeliness*), dan dapat dimengerti (*understandability*).

3. Standar Akuntansi Pemerintahan

Pengertian karakteristik kualitatif laporan keuangan pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) berbeda dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pada SAK karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai. Sementara pada SAP karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Dalam SAK, karakteristik kualitatif didefinisikan secara tegas sebagai “ciri khas”, sementara dalam SAP dinyatakan sebagai “ukuran yang perlu diwujudkan”. Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi

tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

1) Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya

2) Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan

3) Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu

entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4) Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud. Teori kegunaan keputusan informasi akuntansi tercermin dalam bentuk kaidah-kaidah yang harus dipenuhi oleh komponen-komponen pelaporan keuangan agar dapat bermanfaat dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi.

SFAC No. 8, SAK, dan SAP mengungkapkan karakteristik kualitatif informasi akuntansi untuk membantu pengguna informasi dalam pengambilan keputusan ekonomi. Walaupun sebenarnya karakteristik kualitatif informasi akuntansi yang dikeluarkan dalam *statement* tersebut berbeda-beda satu sama lain, namun kesemuanya

adalah bertujuan untuk bagaimana bisa membantu dalam pengambilan keputusan yang bermanfaat oleh pengguna.

4. Sistem Pengendalian Intern

Pengendalian intern merupakan bagian dari manajemen risiko yang harus dilaksanakan oleh setiap lembaga untuk mencapai tujuan lembaga. Demikian perlunya pengendalian intern dalam sebuah lembaga sehingga hal ini harus dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin kesinambungan dan kepercayaan masyarakat. Pengendalian intern harus dilaksanakan seefektif mungkin dalam suatu perusahaan untuk mencegah dan menghindari terjadinya kesalahan, kecurangan, dan penyelewengan. Di organisasi kecil, pengendalian masih dapat dilakukan oleh pemimpin organisasi. Namun semakin besar organisasi, dimana ruang gerak dan tugas-tugas yang harus dilakukan semakin kompleks, menyebabkan pimpinan perusahaan tidak mungkin lagi melakukan pengendalian secara langsung, maka dibutuhkan suatu pengendalian intern yang dapat memberikan keyakinan kepada pimpinan bahwa tujuan perusahaan telah tercapai. Sebuah organisasi nirlaba independen yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan melalui etika dan pengendalian intern yang efektif yang disebut dengan *Committee Of Sponsoring Organization of The Treadway Commission (COSO)*, dibentuk pada tahun 1985.

Menurut *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)* (2013) pengertian pengendalian intern adalah sebagai berikut:

Internal control is a process, effected by an entity's board of directors, management and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives relating to operations, reporting and compliance.

Sedangkan pengertian pengendalian intern menurut Elder, *et al.* (2011) adalah proses yang dirancang untuk memberikan kepastian yang layak mengenai pencapaian tujuan manajemen tentang reliabilitas pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Hal serupa juga disampaikan Jusuf (2014) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern terdiri dari kebijakan dan prosedur yang dirancang manajemen dengan keyakinan yang memadai agar entitas mencapai tujuan dan sasarannya yang berkaitan dengan keandalan pelaporan keuangan, efisiensi dan efektivitas operasi, dan kepatuhan terhadap perundang-undangan. Dari pengertian pengendalian intern tersebut terdapat beberapa konsep dasar sebagai berikut:

- 1) Pengendalian intern merupakan suatu proses pengendalian untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pengendalian intern itu sendiri bukan merupakan suatu tujuan.

- 2) Pengendalian intern dijalankan oleh orang. Pengendalian intern bukan hanya terdiri dari pedoman kebijakan dari formulir, namun dijalankan oleh orang dari setiap pemegang organisasi yang mencakup dewan komisaris, manajemen dan personel lainnya.
- 3) Pengendalian intern dapat diharapkan mampu memberikan keyakinan memadai, bukan keyakinan mutlak, bagi manajemen dan dewan komisaris entitas keterbatasan yang melekat dalam semua sistem pengendalian intern dan pertimbangan manfaat dan pengorbanan dalam pencapaian tujuan pengendalian yang menyebabkan pengendalian intern tidak dapat memberikan keyakinan mutlak.
- 4) Pengendalian intern ditujukan untuk mencapai tujuan yang saling berkaitan diantaranya pelaporan keuangan, kepatuhan, dan operasi.

Penyimpangan dan kebocoran yang masih ditemukan di laporan keuangan menunjukkan laporan keuangan tersebut belum memenuhi karakteristik/nilai informasi yaitu keterandalan. Bila dikaitkan dengan penjelasan mengenai pengendalian intern akuntansi, maka penyebab ketidakandalan laporan keuangan tersebut merupakan masalah yang berhubungan dengan pengendalian intern akuntansi. Apabila pengendalian intern dalam suatu organisasi telah dilaksanakan dengan baik, diharapkan laporan- laporan yang dihasilkan dapat disajikan tepat waktu bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

C. Penelitian Sebelumnya

Tuti Herawati tahun 2014 dengan judul Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan keuangan Pemda Cianjur, sampel pada penelitian ini berjumlah 31 OPD, data yang digunakan adalah data kuantitatif, metode penelitiannya adalah survey, hasil penelitiannya menunjukkan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pemda Cianjur sebesar 83%, secara persial, lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemda Cianjur.

Penelitian Anggraeni S. Madjham (2014) Tentang Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara (Studi Kasus Pada Dppkad Kabupaten Gorontalo Utara) Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang ada DPPKAD Kabupaten Gorontalo Utara. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui kuesioner. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi sederhana. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara.

Perbandingan hasil penelitian sebelumnya dapat dilihat dari persamaan penelitian dan perbedaannya, dilihat dari penelitian ini dan penelitian sebelumnya sama-sama meneliti tentang kualitas laporan keuangan pemerintahan, sedangkan perbedaannya dengan penelitian sebelumnya adalah dalam penelitian sebelumnya membahas tentang “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Semarang)” dan “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara (Studi Kasus Pada Dppkad Kabupaten Gorontalo Utara)” serta objeknya berbeda.

Tabel II.I
Penelitian sebelumnya

| NamaPeneliti | Judul Penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|--------------------------|--|--|--|
| Tuti Herawati (2014) | Tuti Herawati tahun 2014 dengan judul Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan keuangan Pemda Cianjur | Sama-sama meneliti tentang kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. | Pada penelitian sebelumnya meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi sedangkan peneliti sekarang meneliti tentang sistem pengendalian intern nya. |
| Anggraeni Madjham (2014) | Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara (Studi Kasus Pada Dppkad Kabupaten Gorontalo Utara). | Persamaan dengan peneliti ini yaitu sama-sama meneliti tentang sistem pengendalian intern. | Perbedaan dengan peneliti sebelum, nya yaitu di, ana objek penelitian berbeda. |

Sumber: Penulis, 2017

D. Landasan Teori

1. Sistem Pengendalian Intern

Tahun 1994 *Committee of American institute of Accountants* (sekarang bernama *The American Institue Of Certified Publik Accountant* Atau *AICPA*) mendefinisikan pengertian pengendalian intern sebagaimana dikutip oleh Bastian (2009: 51) pengendalian intern rencana organisasi dan semua metode sertaketentuan yang terkoordinasi yang dianut perusahaan untuk melindungi hartamiliknya, mengecek kecermatan dan keandalan

data akuntansi, meningkatkan efisiensi usaha, dan mendorong diataatinnya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan.

Menurut Mahmudi (2010: 20) pengertian sistem pengendalian intern adalah proses yang integral dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen (eksekutif) dan jajarannya untuk memberikan jaminan atau keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Adapun tujuan dibangunnya sistem pengendalian intern adalah

- a. Untuk melindungi asset (termasuk data) Negara
- b. Untuk memelihara catatan secara rinci dan akurat
- c. Untuk menghasilkan informasi keuangan yang akurat, relevan dan andal
- d. Untuk menjamin bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku (Standar Akuntansi Pemerintah/SAP).
- e. Untuk Efisiensi dan Efektivitas Operasi
- f. Untuk Menjamin ditaatinya kebijakan manajemen dan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang dikutip oleh Darise (2009: 302) meliputi lingkungan pengendalian (*control environment*), penilaian resiko (*risk assesment*), informasi dan komunikasi (*information and communication*), aktivitas pengendalian (*control activities*), dan pementauan (*monitoring*). Dari

kelima komponen sistem pengendalian intern tersebut, komponen lingkungan pengendalian merupakan fondasi untuk keseluruhan komponen. Sedangkan komponen informasi dan komunikasi merupakan saluran (*channel*) terhadap tiga komponen pengendalian lainnya. Mahmudi (2010: 20-22)

adapun komponen sistem pengendalian intern pemerintah, terdiri atas lima komponen yaitu:

- a. Lingkungan Pengendalian
- b. Penilaian Resiko
- c. Kegiatan Pengendalian
- d. Informasi dan Komunikasi
- e. Pemantauan

2. Laporan Keuangan Pemerintah

Laporan keuangan dibuat untuk memberikan informasi mengenai kondisi keuangan suatu entitas dalam suatu periode sebagai gambaran dari kinerja entitas yang bersangkutan. Laporan keuangan pemerintah daerah yang komprehensif dapat menjadi fasilitas dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik. Laporan keuangan pemerintah daerah setidaknya terdiri dari neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan laporan surplus/defisit. Bagi pihak eksternal, laporan keuangan pemerintah daerah yang berisi informasi keuangan daerah akan digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan ekonomi,

sosial, dan politik. Sedangkan bagi pihak intern, laporan keuangan digunakan untuk penilaian kinerja, (Mardiasmo, 2004:37).

Laporan keuangan disajikan kepada pemangku kepentingan bukan untuk mempersulit dan membingungkan pembacanya tetapi justru untuk membantu mereka dalam membuat keputusan sosial, politik, dan ekonomi sehingga keputusan yang diambil bias lebih berkualitas, (Mahmudi, 2010:1).

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Namun demikian, berhubung laporan keuangan pemerintah berperan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara, maka komponen laporan keuangan yang disajikan setidaknya mencakup jenis laporan dan elemen informasi yang diharuskan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, karena pajak merupakan sumber utama pendapatan pemerintah, maka ketentuan laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan informasi para pembayar pajak perlu mendapat perhatian, (SAP 2010: 20).

Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang berisi informasi keuangan. Informasi keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan tersebut digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, baik pihak internal maupun pihak eksternal. Dilihat dari sisi manajemen pemerintah (pihak internal), laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Sedangkan

dari sisi pemakai eksternal, laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan, (Mahsun, 2006: 123).

Adapun tujuan dari pembuatan laporan keuangan pemerintah menurut Mahsun (2006: 123-124) adalah sebagai berikut:

- a) Kepatuhan dan pengelolaan
- b) Akuntabilitas dan pelaporan retrospektif
- c) Perencanaan dan informasi otorisasi
- d) Kelangsungan Organisasi
- e) Hubungan masyarakat
- f) Sumber fakta dan gambaran

3. Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya, (SAP, 2010: 245). Menurut Mahmudi (2010:11-12) laporan keuangan yang disajikan pemerintah daerah dinilai berkualitas apabila memenuhi ciri-ciri berikut:

- a) Relevan
- b) Andal
- c) Dapat Dibandingkan
- d) Dapat Dipahami

4. Peranan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.

Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengenai nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

- a. Akuntabilitas
- b. Manajemen
- c. Transparansi
- d. Evaluasi kinerja
- e. Keseimbangan antargenerasi

(menurut pengelolaan dan pelaporan keuangan pemerintah PP no. 71 tahun 2010 tentang SAP).

5. Tujuan Pelaporan Keuangan

(Menurut pengelolaan dan pelaporan keuangan pemerintah PP no. 71 tahun 2010 tentang SAP).

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah.
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah.
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi.
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya. Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumberdaya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

- 1) aset
- 2) kewajiban
- 3) ekuitas dana
- 4) pendapatan
- 5) belanja
- 6) transfer
- 7) pembiayaan dan
- 8) arus kas

Secara garis besar, tujuan umum penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah :

1. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan.

2. Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.

Secara khusus, tujuan khusus penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah :

1. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi aliran kas, saldo neraca, dan kebutuhan sumber daya finansial jangka pendek unit pemerintah.
2. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu unit pemerintahan dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya.
3. Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja, kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan lain yang disyaratkan.
4. Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran, serta untuk memprediksi pengaruh pemilikan dan pembelanjaan sumber daya ekonomi terhadap pencapaian tujuan operasional.
5. Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional

Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3. Neraca
4. Laporan Operasional
5. Laporan Arus Kas
6. Laporan Perubahan Ekuitas
7. Catatan atas Laporan Keuangan

6. Manfaat Implementasi PP No.71 Tahun 2010 pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

(Menurut pengelolaan dan pelaporan keuangan pemerintah PP no. 71 tahun 2010 tentang SAP). Salah satu misi pemerintahan Indonesia saat ini adalah mewujudkan pemerintahan yang bersih. Upaya konkrit dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah (daerah) mengharuskan setiap pengelola keuangan daerah untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Transparansi yang merupakan salah satu tujuan MDGs diperlukan untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih.

Laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan daerah atau Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah bentuk pertanggung jawaban sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 56 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pemerintah Pusat,

Kementerian, Lembaga dan Pemerintah daerah berkewajiban untuk menyusun Laporan Keuangan. Laporan keuangan merupakan sumber informasi finansial yang memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kualitas keputusan yang dihasilkan. Informasi keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan tersebut digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, baik internal maupun eksternal.

Tahun 2005 pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Peraturan tersebut mengatur akuntansi berbasis kas menuju akrual (*Cash towards Accrual*), dan merupakan PP transisi karena UU Keuangan Negara dan Perbendaharaan Negara mengamanatkan pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja basis akrual. Tahun 2010, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual tuntas disusun Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dan ditetapkan sebagai Peraturan Pemerintah dalam PP Nomor 71 Tahun 2010. Implementasi dari peraturan tersebut, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat maupun Daerah secara bertahap didorong untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual. Paling lambat tahun 2015, seluruh laporan keuangan daerah sudah menerapkan SAP berbasis akrual.

Secara konseptual hanya terdapat dua basis akuntansi, yaitu basis kas dan basis akrual. Basis di antara keduanya hanya merupakan langkah transisi dari basis kas ke basis akrual. Apabila proses transisi dilakukan dari basis kas ke basis akrual maka akan semakin banyak tujuan laporan

keuangan yang dapat dipenuhi. Dengan menggunakan basis akrual, informasi yang dapat diperoleh dari basis-basis yang lain juga dapat disediakan.

Basis akuntansi yang sekarang ini diterapkan oleh pemerintah dalam pembuatan laporan keuangan pemerintah sesuai dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan adalah *dual basis*. Adapun yang dimaksud dengan dual basis adalah pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran menggunakan basis kas, sedangkan untuk pengakuan aktiva, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca menggunakan basis akrual. Penerapan akuntansi basis akrual merupakan jawaban atas penyajian informasi pertanggungjawaban keuangan daerah yang lebih informatif sehubungan dengan kinerja pemerintah dalam satu periode.

Secara yuridis, keluarnya PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Akrual mengubah haluan basis akuntansi pemerintahan Indonesia dari *dual basis* menjadi akrual penuh. Sesuai kesepakatan pemerintah dan DPR, implementasi basis akrual ini akan dilaksanakan secara bertahap hingga implementasi penuhnya di tahun 2015.

Akuntansi dengan basis akrual ini dianggap lebih baik daripada basis kas, karena akuntansi berbasis akrual diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya, lebih akurat, komprehensif, dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik.

Pengaplikasian basis akrual dalam akuntansi sektor publik pada dasarnya untuk mengetahui besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan pelayanan publik serta penentuan harga pelayanan yang dibebankan kepada publik.

Akuntansi berbasis akrual membedakan antara penerimaan kas dan hak untuk mendapatkan kas, serta pengeluaran kas dan kewajiban membayarkan kas. Oleh karena itu, dengan sistem akrual pendapatan dan biaya diakui pada saat diperoleh atau terjadi, tanpa memandang apakah kas sudah diterima atau dikeluarkan, dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada penerimaan dan pembayaran kas tetapi juga kewajiban pembayaran kas di masa depan serta sumber daya yang mempresentasikan kas yang akan diterima di masa depan.

Karena itu laporan keuangan menyediakan jenis informasi transaksi masa lalu dan peristiwa lainnya yang paling berguna bagi pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Pada sektor publik, keputusan tidak hanya dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi saja, tetapi banyak keputusan politik dan sosial seperti pengangkatan atau pemberhentian menteri dan pejabat pemerintah, serta pemberian bantuan program kepada kelompok-kelompok masyarakat tertentu sangat tergantung kepada pertimbangan ekonomi pemerintah.

Tujuan umum pelaporan keuangan dengan basis akrual mempunyai peran akuntabilitas dan peran informatif, sehingga laporan keuangan dapat memberikan informasi kepada pengguna. Dengan laporan keuangan berbasis akrual pengguna dapat melakukan penilaian atas kinerja keuangan, posisi keuangan, aliran arus kas suatu entitas, kepatuhan entitas terhadap undang-undang, regulasi, hukum dan perjanjian kontrak. Laporan keuangan berbasis akrual juga dapat membantu pengguna internal dalam pengambilan keputusan tentang penggunaan sumber daya dalam menjalankan suatu usaha. Dalam masa transisi sampai dengan 2015, implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual menurut Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kementerian Keuangan, Sonny Loho, kendala implementasi standar akuntansi pemerintah antara lain adalah SDM yang berkompeten di bidang akuntansi, ketersediaan sarana/prasarana, ketersediaan anggaran, kapasitas manajemen, kemauan politik. Sementara itu strategi yang dapat dilakukan dalam menerapkan peraturan tersebut adalah komitmen pimpinan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, penyediaan SDM yang kompeten, peranan APIP sebagai mitra penyusunan dan penyajian laporan keuangan, penyempurnaan sistem akuntansi, pengelolaan BMN/BMD, mengintensifkan *rewards and punishments*, diperlukan forum komunikasi untuk mendiskusikan temuan/laporan audit.

7. Keterkaitan Kualitas Sistem Pengendalian Intern Terhadap Laporan Keuangan

Pengendalian intern menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2007: 319.2) adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personil lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan yaitu keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, yang terdiri dari (5) lima komponen yaitu: lingkungan pengendalian, penafsiran resiko, sistem informasi dan komunikasi akuntansi, aktivitas pengendalian dan pemantauan.

Sebagaimana didasarkan pada penjelasan Darise (2009: 302) yang mengungkapkan bahwa sebuah laporan keuangan akan menjadi berkualitas jika sistem pengendalian intern di terapkan dengan baik.

Menurut Warren et all (2005) untuk menghasilkan laporan keuangan yang baik harus sesuai dengan PSAK dan SOP yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Sistem akuntansi didalamnya mengatur tentang sistem pengendalian intern (SPI), kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh bagus tidaknya sistem pengendalian intern yang dimiliki perusahaan.

Menurut Mahmudi (2007:11) laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan proses dan tahap-tahap yang harus dilalui yang harus diatur dalam sistem akuntansi pemerintah daerah, sistem akuntansi didalamnya

mengatur sistem pengendalian intern, kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh bagus tidaknya sistem pengendalian intern yang dimiliki.

E. Kerangka Pemikiran

Akuntansi berbasis akrual merupakan hal yang baru di pemerintahan Indonesia, di pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah, peraturan akuntansi berbasis akrual dikeluarkan melalui SAP berbasis akrual yang sebelumnya dalam PP No. 24 tahun 2005, tetapi tidak bisa dipenuhi oleh pemerintah daerah sehingga dikaji ulang dalam PP No.71 tahun 2010, SAP berbasis dibuat dengan tujuan agar informasi yang tersaji dalam laporan keuangan bisa lebih akurat, relevan, dan transparan.

Akuntansi berbasis akrual dianggap lebih baik karena tidak memperhatikan kas atau setara kas, akuntansi ini mencatat transaksi pada saat terjadinya peristiwa, bukan pada saat kas masuk atau keluar sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Untuk memenuhi sebuah laporan yang berkualitas dibutuhkan komponen lain salah satunya yaitu sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), ada 5 unsur dari SPIP yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian intern. Lima unsur tersebut terjalin erat satu dengan yang lainnya dan dapat diharapkan dapat mengontrol setiap peristiwa yang terjadi di pemerintahan. Laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas harus memenuhi 4 kriteria kualitatif yaitu: relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Berdasarkan uraian diatas dan landasan teori, maka disusun suatu model penelitian mengenai penelitian yang akan dilakukan. Model penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Gambar II.I
Karangka Pemikiran



Variabel yang akan diteliti pada peneliti ini adalah kualitas laporan keuangan sebagai objek utama penelitian dan juga sebagai variabel dependen penelitian. Dan variabel lainya sebagai variabel independen yaitu sistem pengendalian intern.

1. Sistem Pengendalian Intern

Tahun 1994 *Committee of American institute of Accountants* (sekarang bernama *The American Institute Of Certified Publik Accountant* Atau *AICPA*) mendefinisikan pengertian pengendalian intern sebagaimana dikutip oleh Bastian (2009: 51) pengendalian intern rencana organisasi dan semua metode serta ketentuan yang terkoordinasi yang dianut perusahaan untuk melindungi harta miliknya, mengecek kecermatan dan keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi usaha, dan mendorong ditaatinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan.

Menurut Mahmudi (2010: 20) pengertian sistem pengendalian intern adalah proses yang integral dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen (eksekutif) dan jajarannya untuk memberikan jaminan atau

keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Adapun tujuan dibangunnya sistem pengendalian intern adalah

- a. Untuk melindungi asset (termasuk data) Negara
- b. Untuk memelihara catatan secara rinci dan akurat
- c. Untuk menghasilkan informasi keuangan yang akurat, relevan dan andal
- d. Untuk menjamin bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku (Standar Akuntansi Pemerintah/SAP).
- e. Untuk Efisiensi dan Efektivitas Operasi
- f. Untuk Menjamin ditaatinya kebijakan manajemen dan peraturan perundangan yang berlaku.

Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang dikutip oleh Darise (2009: 302) meliputi lingkungan pengendalian (*control environment*), penilaian resiko (*risk assesment*), informasi dan komunikasi (*information and communication*), aktivitas pengendalian (*control activities*), dan pemantauan (*monitoring*). Dari kelima komponen sistem pengendalian intern tersebut, komponen lingkungan pengendalian merupakan fondasi untuk keseluruhan komponen. Sedangkan komponen informasi dan komunikasi merupakan saluran (*channel*) terhadap tiga komponen pengendalian lainnya. Mahmudi (2010: 20-22)

Komponen sistem pengendalian intern pemerintah, terdiri atas lima komponen yaitu:

- a. Lingkungan Pengendalian
- b. Penilaian Resiko
- c. Kegiatan Pengendalian
- d. Informasi dan Komunikasi
- e. Pemantauan

2. Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya,(SAP, 2010: 245). Menurut Mahmudi (2010:11-12) laporan keuangan yang disajikan pemerintah daerah dinilai berkualitas apabila memenuhi ciri-ciri berikut:

1. Relevan
2. Andal
3. Dapat Dibandingkan
4. Dapat Dipahami

F. Hipotesis

Menurut sugiyono (2010: 93) mengungkapkan bahwa pengertian hipotesis adalah merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan.

Hipotesis penelitian dapat diuraikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan harus diuji secara empiris. Maka berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya maka dalam penelitian ini, rumusan hipotesis penelitian yang disajikan penulis adalah “Terdapat pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah”

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian menurut sugiyono (2009:6-7) adalah sebagai berikut:

1. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri baik hanya satu variable atau lebih
2. Penelitian Komperatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan atau berupa hubungan sebab akibat antara dua variable
3. Penelitian Asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variable.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Asosiatif, dimana penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variable.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Sijunjung dan alamat website data www.bpkp.go.id/sumbar

C. Operasionalisasi Variabel

Operasional variable adalah definisi yang memberikan arti atau menspesifikasikan bagaimana variable atau kegiatan tersebut diukur, variable yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Variabel sistem pengendalian Terdapat lima indikator, yaitu Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, Pemantauan

Variabel terikat adalah variabel yang menjadi perhatian utama peneliti. Pada penelitian ini, yang menjadi variabel dependen adalah Kualitas Informasi laporan Keuangan. Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah adalah memenuhi prasyarat normatif agar dapat mencapaitujuannya yakni relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Kualitas informasi laporan keuangan daerah diukur dengan empat indikator yaitu: Relevan, Andal, Dapat Dibandingkan, Dapat Dipahami

Tabel III.I
Operasional Variabel

| Variabel | Definisi | Indikator |
|---|--|---|
| Kualitas Sistem pengendalian intern (X_1) | sistem pengendalian intern adalah proses yang integral dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen (eksekutif) dan jajarannya untuk memberikan jaminan atau keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan | a. Lingkungan Pengendalian b. Penilaian Resiko c. Kegiatan Pengendalian d. Informasi dan Komunikasi e. Pemantauan f. SIA -SOP -Dokumen g. SDM |
| Kualitas laporan keuangan (Y) | Kualitas laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya | a. Relevan, b. Andal c. Dapat Dibandingkan d. Dapat Dipahami. |

Sumber: Penulis, 2017

Tabel III.2

Kualifikasi Kualitas Pengendalian Intern dan Kualitas Laporan Keuangan

| Tahun | Kualifikasi Sistem Pengendalian Intern | Kualifikasi Laporan Keuangan |
|-------|--|------------------------------|
| 2011 | Kurang Baik | WDP |
| 2012 | Kurang Baik | WDP |
| 2013 | Kurang Baik | WDP |
| 2014 | Kurang Baik | WDP |
| 2015 | Kurang Baik | WDP |

Sumber: Penulis, 2017

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sistem pengendalian intern dari tahun 2011-2015 dikatakan masih kurang baik, terlihat dimana dampak dari sistem pengendalian yang kurang baik terlihat pada masih diberikan opini audit WDP (wajar dengan pengecualian) oleh BPK pada tahun 2011-2015.

Menurut BPK suatu laporan keuangan yang baik itu jika opini audit laporan keuangan mendapat WTP, jika didapat opini selain WTP laporan keuangan tersebut dikatakan kurang baik, dikatakan laporan keuangan kurang baik berarti sistem pengendalian intern yang kurang baik dan tidak efektif.

Sistem pengendalian dikatakan kurang baik apabila SDM atau karyawan yang bertanggung jawab tidak berkompeten untuk mencatat transaksi dari sejak tahap pertama sampai dengan akhir berupa posting dalam buku besar dan pelaporan, ini memperbesar kemungkinan bahwa kesalahan yang tidak disengaja akan tidak terungkap dan mendorong kinerja yang serampangan.

Kegagalan SDM pemda dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah

Sistem pengendalian intern dapat dikatakan baik dan efektif adalah:

1. SDM yang mampu dan dapat dipercaya yang berarti untuk mendapat seorang SDM yang berkualitas, baik dan kompeten perusahaan dapat memberikan gaji yang baik, memberikan pelatihan dan pengawasan
2. Tugas Pertanggung jawaban yang berarti semua tugas atau kewajiban telah dijelaskan dengan baik dan ditugaskan pada masing-masing individu yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas tersebut
3. Pemisahan tugas yang artinya dimana konsep pemisahan tugas dalam pengendalian intern akan membatasi kesempatan terjadinya kesalahan

Jika hal ini terus dibiarkan, ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah akan muncul, serta peluang untuk terjadinya korupsi keuangan daerah akan semakin besar.

Menurut Mahmudi (2007:11) laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan proses dan tahap-tahap yang harus dilalui yang harus diatur dalam sistem akuntansi pemerintah daerah, sistem akuntansi didalamnya mengatur sistem pengendalian intern, kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh bagus tidaknya sistem pengendalian intern yang dimiliki.

D. Populasi dan Sampel

Populasi yaitu sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu (Nur & Bambang, 2009:11).

Jadi populasi dalam peneliti ini adalah pegawai BPKAD yang bekerja di BPKAD kabupaten sijunjung. Populasi dalam penelitian ini adalah berjumlah 76 orang dan sampel pada penelitian ini adalah berjumlah 39 orang, alasannya keterbatasan waktu.

E. Data yang Diperlukan

Menurut Nur & Bambang (2009: 146-147) data penelitian pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi:

1. Data Primer

Data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumbernya (tidak melalui perantara)

2. Data Sekunder

Data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh orang lain)

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui kuisisioner yang dibagikan kepada pegawai. Data sekunder dalam penelitian ini adalah diperoleh melalui artikel, jurnal, dan penelitian sebelumnya.

F. Metode Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2009: 402-425) menyatakan bahwa metode pengumpulan data dapat dilakukan sebagai berikut:

a. Wawancara

Merupakan metode pengumpulan data dalam metode survey yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian

b. Kuisisioner

Merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara member seperangkat atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk menjawabnya.

c. Observasi

Merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.

d. Dokumentasi

Merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu dan dokumentasi bias berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara Kuisisioner dan dokumentasi.

G. Analisis Data dan Teknik Analisis

1. Analisis Data

Menurut Sugiyono (2009: 13-14) analisis data dalam penelitian dikelompokkan menjadi 2 yaitu:

a. Analisis Kualitatif

Analisis Kualitatif yaitu suatu metode analisis dengan menggunakan data yang berbentuk kata, kalimat, skema, dan gambar.

b. Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif yaitu suatu metode analisis dengan menggunakan data berbentuk angka, atau data kualitatif yang diangkakan.

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif dilakukan dengan menggunakan pengujian statistik dari hasil kuisioner, kemudian hasil pengujian tersebut akan dijelaskan menggunakan kalimat-kalimat.

2. Teknik Analisis

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data regresi linear sederhana. Penggunaan teknik ini karena dalam penelitian ini hanya digunakan satu variabel terikat (kualitas laporan keuangan) dan satu variable independen (Sistem pengendalian Intern). Model yang akan dibentuk sesuai dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2009: 261) adalah :

$$Y = a + bx$$

Y : Variabel dependen (kualitas laporan keuangan)

X : Variabel independen (Sistem pengendalian Intern)

b : Angka arah atau koefisien regresi

a : Intercept atau konstata

Untuk kemudahan dalam perhitungan digunakan jasa computer berupa software dengan program SPSS (Statistical Package for Social Science) for windows version 16 dan Microsoft exel 2007.

a) Uji Validitas

Uji validitas (test of validity) dilakukan untuk mengetahui apakah alat pengukur yang telah disusun telah memiliki validitas atau tidak. Hasilnya akan ditunjukkan oleh suatu indeks sejauh mana alat ukur benar-benar mengukur apa yang diukur.

Menurut Dwi (2009: 16) ada 2 syarat yang harus dipenuhi agar sebuah butir dikatakan valid, yaitu:

- 1) Korelasi dari item-item kuisioner haruslah kuat dan peluang kesalahan tidak terlalu besar (menurut teori 5% dalam ujian pertama).
- 2) Korelasi harus memiliki nilai atau arah yang positif. Arah positif tersebut berarti bahwa r_{bt} (nilai korelasi yang akan digunakan untuk mengukur validitas) harus lebih besar dari r_{tabel} .

Validitas alat pengukur dilakukan dengan mengkorelasikan antar skor yang diperoleh dari masing-masing item pertanyaan dengan korelasi rata-rata per item pertanyaan dengan alat bantu SPSS. Apabila ternyata semua pertanyaan yang disusun berdasarkan dimensi konsep berkorelasi dengan korelasi rata-rata per item pertanyaan, maka dapat dikatakan bahwa alat pengukuran tersebut mempunyai validitas. Teknik korelasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah

teknik korelasi *product moment*. Teknik korelasi product moment memerlukan tingkat pengukuran variabel sekurang-kurangnya interval kerana skor sebagian di dapat dari skala pengukuran ordinal.

Menurut Sugiyono (2005: 317) nilai r untuk $N=30$ dengan taraf signifikan 5% adalah 0,361, jadi apabila r lebih besar dari 0,361 dinyatakan valid dan sebaliknya apabila nilai r lebih kecil dari 0,361 dinyatakan tidak valid.

b) Uji Reliabilitas Instrumen

Uji reliabilitas dilakukan untuk menilai kestabilan ukuran dan konsistensi responden dalam menjawab kuesioner. Kuesioner tersebut mencerminkan konstruk sebagai dimensi suatu variabel yang disusun dalam bentuk pertanyaan, atau pernyataan. Uji reliabilitas dilakukan terhadap item pernyataan yang sudah valid. Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan *Cronbach Alpha* . Semakin dekat *Alpha Cronbach* dengan 1 (satu), semakin tinggi Kualitas konsistensi internal. “Secara umum, Kualitas kurang dari 0,60 dianggap buruk, Kualitas dalam kisaran 0,70 adalah dapat diterima, dan lebih dari 0,80 adalah baik”.(UmaSekaran, 2006:182)

c) Uji Hipotesis

1) Pengujian Hipotesis Secara Bersama (Uji F)

Pengujian hipotesis secara bersama merupakan pengujian hipotesis koefisien regresi berganda dengan B_1 dan B_2 secara bersama-sama mempengaruhi Y .

1. Hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H_0 : keahlian audit dalam dan independensi auditor tidak berpengaruh terhadap pemberian pendapat auditor secara bersama.

H_a : keahlian audit dan independensi auditor berpengaruh terhadap pemberian pendapat auditor secara bersama.

2. Menentukan Taraf Nyata

Tingkat signifikan sebesar 5% taraf nyata dari t tabel ditentukan dari derajat bebas (db) = $n-k-1$, taraf nyata (α) berarti nilai F tabel, taraf nyata dari F tabel ditentukan dengan derajat bebas (db) = $n-k-1$.

3. H_0 di tolak apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$, H_a diterima apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$.

4. Kesimpulan H_0 di tolak apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau H_a diterima apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$.

2) Uji Hipotesis Secara Parsial/Individual (Uji t)

Pengujian hipotesis secara parsial/individual merupakan pengujian hipotesis koefisien regresi berganda dengan hanya satu B (B_1 atau B_2) yang mempengaruhi Y. Langkah-langkah dalam uji hipotesis secara parsial atau individual yaitu:

a. Merumuskan Hipotesis

H_0 : keahlian audit dalam dan independensi auditor tidak berpengaruh terhadap pemberian pendapat auditor secara persial/individual.

H_a : keahlian audit dan independensi auditor berpengaruh terhadap pemberian pendapat auditor secara persial/individual.

b. Menentukan Tarif Nyata

Tingkat signifikan sebesar 5%, taraf nyata dari t tabel ditentukan dari derajat bebas (db) = $n-k-1$, taraf nyata (α) berarti nilai t tabel, taraf nyata dari F tabel ditentukan dengan derajat bebas (db) = $n-k-1$.

c. H_0 ditolak apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$, H_a diterima apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$. Berdasarkan probabilitas: H_0 ditolak jika P value $< 5\%$ H_0 diterima jika P value $> 5\%$.

d. Kesimpulan

Menarik kesimpulan H_0 ditolak apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau H_a diterima apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung

Pada zaman pemerintahan Hindia Belanda Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung termasuk wilayah *Afdeling* Solok dengan ibu kotanya Sawahlunto. *Afdeling* Solok mempunyai beberapa *Onder Afdeling*, salah satu diantaranya adalah *Onder Afdeling* Sijunjung dengan ibu negerinya Sijunjung. Ini berlangsung sampai pada zaman pemerintahan Jepang. Sesudah Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, pada Oktober 1945 dibentuk Kabupaten Tanah Datar dengan ibu kotanya Sawahlunto yang wilayahnya meliputi beberapa kewedanan, yaitu Batu Sangkar, Padang Panjang, Solok, Sawahlunto dan Sijunjung.

Dalam rangka melanjutkan perjuangan kemerdekaan, Gubernur Milite Sumatra Barat, berdasarkan surat keputusan Nomor : SK/9/GN/IST tanggal 18 Februari 1949 membentuk kabupaten baru, yakni Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, dengan Bupati Militernya Sulaiman Tantuah Bagindo Ratu. Kemudian untuk melaksanakan tugasnya, Bupati Militer Sulaiman Tantuah Bagindo Ratu mengadakan rapat di Masjid Koto Gadang Tanjung Bonai Aur. Dalam rapat ini hadir Rustam Efendi (Camat Koto VII), Amir Mahmud (Wali Perang Nagari Limo Koto), M. Syarif Datuk Gunung Emas, M. Zen Datuk Bijo Dirajo, Hasan Basri dan Darwis

(staf Kantor Camat Koto VII), Marah Tayab, Maju Arif, M. Saman, Ahmadi, Malin Dubalang (Wali Perang Nagari Tanjung Bonai Aur), Saidin Datuk Perpatih Suanggi, Jamiruddin Mantari Sutan, Jasam Gelar Pandito Sampono dan Datuk Putih. Rapat tersebut menghasilkan beberapa keputusan, antara lain menunjuk pembantu/staf penasehat Bupati Militer Sawahlunto/Sijunjung: M. Syarif Datuk Gunung Emas, M. Zen Datuk Bijo Dirajo dari Tanjung Ampalu, H. Syafei Idris dari Padang Laweh dan Marah Tayab dari Sumpur Kudus. Staf administrasi terdiri dari Hasan Basri dan Darwis dari Kantor Camat Koto VI. Staf perbekalan/logistik, Malin Dubalang (Walinagari Perang Tanjung Bonai Aur), Saidin Datuk Perpatih Suanggi, Jasam Gelar Pandito Sampono, Jamiruddin Sutan dan Datuk Patih. Keputusan lain, akan diadakan lagi rapat dengan tokoh masyarakat dari para komandan front Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung pada tanggal 28 Februari 1949. Tempat rapat akan ditentukan kemudian oleh komandan sektor dan komandan front. Dalam rangka persiapan rapat dimaksud, diberikan tanggungjawab kepada Salim Halimi untuk menghubungi dan mencari Ahmad Jarjis Bebas Thani, Makmun Datuk Rangkayo Mulie (Jaksa) dan tokoh lainnya.

Pada tanggal 28 Februari 1949 dilaksanakan rapat yang lebih lengkap, dihadiri tokoh masyarakat dan komandan front Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung. Di sini, Tantuah Bagindo Ratu, sesuai SK Gubernur Militer Sumatra Barat Nomor: 49/G.M.Ist-1949 tanggal 18 Februari 1949, diresmikan menjadi Bupati Militer Kabupaten

Sawahlunto/Sijunjung. Pada tanggal 17 Mei 1949, pemerintah darurat Republik Indonesia mengadakan rapat di Sumpur Kudus yang dilanjutkan lagi dengan rapat khusus mengenai Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung. Dalam rapat khusus ini hadir tokoh-tokoh, antara lain Mr. Muhammad Rasyid (Gubernur Militer Sumatra Barat), Juwir Muhammad dan H. Ilyas Yakub (staf penasehat gubernur), Bupati Militer Sawahlunto/Sijunjung Tantuah Bagindo Ratu bersama staf, H. Rusli Abdul Wahid (Wedana Sijunjung), Nurdin Datuk Majo Sati (Wedana Sawahlunto), Rustam Efendi (Wedana Tanjung Ampalu) dan lain-lain. Rapat tersebut melahirkan keputusan, antara lain, Bupati Militer Sulaiman Tantuah Datuk Bagindo Ratu dipindahkan ke pemerintahan pusat. Ahmad Jarjis Bebas Thani, Sekretaris Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, ditunjuk melaksanakan tugas Bupati Militer Sawahlunto/Sijunjung, sebagai Plt. Keputusan lain penggantian beberapa wedana dan camat.

Mengingat perkembangan situasi saat itu, ibu kota Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung selalu berpindah-pindah, antara lain di Tanjung Bonai Aur, Tamparungo, Durian Gadang, Sungai Betung, Sibakur, Langki, Buluh Kasok, Lubuk Tarok, sampai pada ceas fire berkedudukan di Palangki. Setelah penyerahan kedaulatan oleh Belanda kepada pemerintahan Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949, ibu kota Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung ditetapkan menjadi daerah otonomi Sawahlunto/Sijunjung dalam lingkungan Provinsi Sumatra Tengah. Melalui Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956, dibentuk kota kecil Padang

Panjang, Payakumbuh dan Sawahlunto. Kota kecil Sawahlunto beribu kota di Sawahlunto, Kepala daerahnya dirangkap oleh Kepala daerah tingkat II Sawahlunto/Sijunjung. Tahun 1960 ibukota Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung dipindahkan dari Sawahlunto ke Sijunjung. Pada tahun 1966 dipindahkan lagi ke Muaro Sijunjung, sesuai persetujuan DPR GR Nomor 10 tahun 1970 tanggal 30 Mei 1970 yang kemudian disahkan oleh Menteri Dalam Negeri melalui surat keputusannya Nomor 59 tahun 1973.

Selanjutnya melalui sidang pleno DPRD Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, tanggal 25 November 1982 telah disepakati tanggal 18 Februari ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung yang dituangkan dalam surat keputusan DPRD Nomor 13/KPTS/DPRD-SS/1982 tentang hari jadi Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung. Perkembangan selanjutnya pada tahun 1984/1985 Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung yang semula terdiri dari sembilan kecamatan, dimekarkan menjadi 13 kecamatan. Kecamatan induk terdiri dari, Kecamatan Talawi, Sawahlunto, Sumpur Kudus, Koto VII, IV Nagari, Sijunjung, Tanjung Gadang, Pulau Punjung dan Kecamatan Koto Baru. Kecamatan Perwakilan, Sijunjung di Lubuk Tarok, Tanjung Gadang di Kamang, Pulau Punjung di Sitiung dan Kecamatan Perwakilan Koto Baru di Sungai Rumbai. Pada tahun 1985, guna mempelancar tugas bupati, dibentuk pembantu bupati Sawahlunto/Sijunjung wilayah Selatan yang berkedudukan di Sungai Dareh. Kemudian pada tahun 2000 kelembagaan

kantor pembantu bupati ini dihapuskan, sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah.

Setelah keluarnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1990 tanggal 1 September 1990 tentang perubahan batas dan luas Kotamadya Sawahlunto, Kabupaten Solok dan Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, seluruh Kecamatan Talawi dan sebagian Kecamatan Sawahlunto dimasukan ke Kotamadya Sawahlunto. Sedangkan sisanya dibentuk menjadi satu kecamatan baru, yaitu Kecamatan Kupitan. Perkembangan kemudian, berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1995, Kecamatan Perwakilan Pulau Punjung di Sitiung dan Kecamatan Perwakilan Koto Baru di Sungai Rumbai, pada tanggal 22 Nopember 1995 diubah statusnya menjadi kecamatan defenitif, yaitu Kecamatan Sitiung dan Kecamatan Sungai Rumbai. Selanjutnya, berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 tahun 1999, Kecamatan Perwakilan Tanjung Gadang di Kamang, pada tanggal 29 Juli 1999 diubah statusnya menjadi kecamatan defenitif dengan nama Kecamatan Kamang Baru. Terakhir melalui peraturan daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 8 tahun 2000, Kecamatan Perwakilan Sijunjung di Lubuk Tarok diubah statusnya menjadi kecamatan defenitif dengan nama Kecamatan Lubuak Tarok. Diresmikan pada tanggal 28 Agustus 2000 oleh Bupati Sawahlunto/Sijunjung.

Sesuai dengan identitas dan corak budaya serta keragaman masyarakat Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, telah disepakati motto daerah 'di mana

bumi dipijak di situ langit dijunjung' yang tertuang dalam SK dewan No.14/DPRD-SS/1987 tanggal 5 November 1987. SK tersebut disahkan oleh Menteri Dalam Negeri tanggal 23 November 1988 No.SK.050.23.815. Untuk mencerminkan identitas Muaro Sijunjung sebagai ibu kota Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, DPRD dengan surat keputusannya tanggal 21 April 1990 No.03/SK/DPRD-SS-1990, menetapkan ungkapan ciri khas Muaro Sijunjung Kota 'Pertemuan' yang diartikan dalam akronim 'Per' permai, 'Te' tertib, 'Mu' musyawarah, 'A' aman dan 'N' nostalgia. Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 38/2003, sesuai tuntutan zaman dan masyarakat, di penghujung tahun 2003, Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung dimekarkan dengan pembentukan Kabupaten Dharmasraya yang di dalamnya terhimpun Kecamatan Pulau Punjung, Situng, Koto Baru dan Kecamatan Sungai Rumbai. Sehingga dari 12 kecamatan yang dimiliki Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung sebelum pemekaran, kini tinggal delapan, yaitu Kecamatan Kupitan, Koto VII, Sumpur Kudus, Sijunjung, IV Nagari, Lubuak Tarok, Tanjung Gadang dan Kecamatan Kamang Baru.

Dalam jumlah kecamatan yang semakin sedikit, luas wilayah yang semakin kecil dan jumlah penduduk yang berkurang, peringatan hari jadi ke-59 tahun 2008, adalah peringatan yang sangat bersejarah bagi masyarakat daerah ini, karena pada rapat istimewa DPRD yang merupakan puncak peringatan, Menteri Dalam Negeri RI, Mardianto meresmikan perubahan nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung menjadi Kabupaten

Sijunjung, sehingga sampai peringatan hari jadi ke-63, 18 Februari 2012, kabupaten ini sudah empat tahun bernama Sijunjung.

VISI

Visi daerah tahun 2016-2021 :

"Terwujudnya Nagari Madani yang Maju, Jaya, Adil dan Sejahtera."

MISI

Misi daerah Tahun 2016-2021 :

1. Mewujudkan perekonomian masyarakat yang kuat dan sejahtera;
2. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang kuat, cerdas dan berakhlak mulia.
3. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan merata;
4. Mewujudkan pemerintahan yang bekerja dan melayani;
5. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan;
6. Melakukan revitalisasi adat dan budaya berlandaskan Adat basandi Syarak, Syarak basandi Kitabullah;
7. Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan; dan
8. Revitalisasi adat dan seni budaya anak nagari.

Dalam hasil penelitian akan dijelaskan mengenai deskripsi data, tingkat pengembalian kuesioner, gambaran umum responden, statistik deskriptif,

hasil uji kualitas data, hasil uji asumsi dasar dan hasil uji asumsi klasik, serta hasil uji hipotesis.

a. Deskripsi Data

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai di kantor BPKAD kabupaten sijunjung. Sesuai dengan metode penarikan sampel yaitu *Purposive Sampling* maka sampel dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja di kantor BPKAD kabupaten sijunjung. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner, yang ditujukan kepada responden untuk kantor BPKAD yang dijadikan tempat penelitian. Peneliti menyerahkan kuesioner dan mengambil kembali kuesioner tersebut sesuai perjanjian pengembalian. Pengumpulan data dilakukan dari tanggal 30 Januari – 2febuari 2017. Dari 76 pegawai, 39 diantaranya bersedia menjadi sampel untuk menjawab kuisisioner. Kuesioner yang disebar berjumlah 39 kuesioner, 1 kuesioner untuk masing-masing pegawai.

1. Gambaran Umum Responden

Responden dalam penelitian ini adalah kantor BPKAD Kabupaten sijunjung. Dari data yang terkumpul, diperoleh deskripsi responden yang dibagi berdasarkan jenis kelamin, umur responden, tingkat pendidikan dan masa kerja di SKPD terkait. Adapun gambaran umum responden disajikan dalam tabel berikut :

Tabel IV.I

| Gambaran Umum Responden Uraian | Frekuensi | Persentase |
|---------------------------------------|------------------|-------------------|
| Jenis Kelamin | | |
| Pria | 43 | 56,58% |
| Wanita | 33 | 43,42% |
| Umur | | |
| 20 – 30 Tahun | 24 | 31,58% |
| 31 – 40 Tahun | 30 | 39,47% |
| 41 – 50 Tahun | 10 | 13,16% |
| >50 Tahun | 12 | 15,79% |
| Tingkat Pendidikan | | |
| SMA | 23 | 30,26% |
| D3 | 10 | 13,16% |
| S1 | 30 | 39,47% |
| S2 | 12 | 15,79% |
| SD | 1 | 1,31% |
| Jabatan | | |
| ASN | 66 | 86,84% |
| PTT | 10 | 13,16% |

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2017

Dari tabel 4.1 diatas, dapat dilihat bahwa gambaran responden berdasarkan jenis kelaminnya, sebagian besar responden berdominasi berjenis kelamin pria yaitu sebanyak 43 orang atau sebanyak 56,58% dan sedangkan responden wanita sebanyak 33 orang atau sebanyak 43,42%. Serta berdasarkan umur responden, maka rata-rata umur responden antara 31 tahun sampai dengan 40 tahun, hal ini dilihat dari tabel besarnya persentase untuk umur yang bekisar antara 31 tahun sampai denan 40 tahun yaitu sebesar 39,47%.

Dilihat dari tingkat pendidikan mayoritas berasal dari tamatan S1, yaitu sebanyak 30 (39,47%). Hal ini berarti bahwa, pola pikir dari pengelola keuangan telah cukup memadai untuk mampu menjalankan tugas sebagai pengelola keuangan daerah dengan keterampilan dan kemampuan yang dimilikinya sesuai dengan tingkat pendidikan yang dimiliki. Kemudian tamatan SMA sebanyak 23 orang (30,26%), tamatan S2 sebanyak 12 orang (13,79%) dan sebanyak 10 orang (13,16%) mempunyai pendidikan terakhir D3 serta SD 1 orang (1,31%). Berdasarkan jabatan, responden terbanyak dalam penelitian ini adalah ASN (aparatur sipil negara) sebanyak 66 orang (86,84%) dan PTT (pegawai tidak tetap) sebanyak 10 orang (13,16%).

Berdasarkan data yang ditunjukkan dari identitas responden, responden pada umumnya memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi serta mempunyai pengalaman kerja yang cukup lama. Hal ini terlihat dari persentase identitas responden. Sehingga dapat diharapkan pernyataan-pernyataan yang dijawab oleh responden dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

2. Jawaban Responden

Penelitian berdasarkan pada transformasi terhadap data penelitian dalam tabulasi, sehingga mudah diinterpretasikan dan mudah dipahami. Kuesioner ini telah dibagikan kepada sebagian pegawai pada BPKAD Kabupaten Sijunjung. Dari 39 kuesioner yang dibagikan peneliti dan layak dijadikan sumber data untuk melakukan analisis dalam penelitian ini.

Kuesioner yang dibagikan kepada responden terdiri dari 2 variabel, dengan 1 variabel X (bebas) yaitu sistem pengendalian intern serta 1

variabel Y (terikat) yaitu kualitas laporan keuangan. Beberapa pertanyaan Variabel sistem pengendalian intern (X_1) terdiri dari 14 pernyataan yang terbagi atas 5 (lima) indikator, indikator lingkungan pengendalian terdiri dari 3 (tiga) pernyataan, indikator penilaian resiko terdiri dari 3 (empat) pernyataan, indikator kegiatan pengendalian terdiri dari 3(tiga) pernyataan, indikator informasi dan komunikasi terdiri dari 3(tiga) pernyataan, dan indikator pemantauan terdiri dari 2 (dua) pernyataan. Variabel kualitas laporan keuangan (Y) terbagi menjadi 4 (empat) indikator dengan 8 pernyataan, indikator relevan terdiri dari 2 (dua) pernyataan, indikator andal terdiri dari 3 (tiga) pernyataan, indikator dapat dibandingkan terdiri dari 2 (dua) pernyataan, dan indikator dapat dipahami terdiri dari 1 (satu) pernyataan. Tujuan diberikannya pernyataan tersebut adalah untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan.

Data yang sudah diberikan skor kemudian disusun kedalam tabulasi yang memudahkan peneliti dalam berbagai analisis pada penelitian ini, dengan cara memberikan informasi yang dibutuhkan. Skor atas jawaban dari responden kemudian dijumlahkan berdasarkan variabel untuk masing-masing responden. Rekapitulasi data mengenai jawaban responde tentang pengaruh sistem pengendalian intern (X_1) terhadap kualitas laporan keuangan (Y) dapat dilihat pada tabel IV.II berikut :

Tabel IV.II
Hasil Jawaban Responden

| Responden | Data Ordinal | | Data Interval | |
|-----------|--------------|----|---------------|--------|
| | X1 | Y | X1 | Y |
| 1 | 52 | 31 | 20,849 | 19,392 |
| 2 | 57 | 32 | 27,518 | 21,226 |
| 3 | 54 | 31 | 23,605 | 19,075 |
| 4 | 61 | 36 | 34,523 | 28,248 |
| 5 | 57 | 32 | 29,324 | 21,226 |
| 6 | 59 | 34 | 31,579 | 24,586 |
| 7 | 53 | 31 | 22,308 | 19,392 |
| 8 | 55 | 31 | 25,561 | 19,034 |
| 9 | 62 | 31 | 35,980 | 19,523 |
| 10 | 57 | 32 | 28,318 | 21,473 |
| 11 | 56 | 32 | 26,922 | 21,226 |
| 12 | 58 | 31 | 30,076 | 19,432 |
| 13 | 58 | 33 | 30,542 | 22,801 |
| 14 | 58 | 32 | 31,460 | 21,226 |
| 15 | 57 | 32 | 27,518 | 21,226 |
| 16 | 56 | 30 | 27,382 | 17,896 |
| 17 | 55 | 32 | 25,561 | 21,226 |
| 18 | 56 | 32 | 27,382 | 21,226 |
| 19 | 56 | 31 | 26,497 | 19,523 |
| 20 | 55 | 32 | 25,561 | 21,226 |
| 21 | 57 | 34 | 28,254 | 24,822 |
| 22 | 56 | 33 | 28,078 | 22,900 |
| 23 | 57 | 35 | 30,141 | 26,378 |
| 24 | 59 | 32 | 31,293 | 21,226 |
| 25 | 60 | 33 | 34,002 | 22,801 |
| 26 | 53 | 32 | 23,553 | 21,226 |
| 27 | 61 | 38 | 36,024 | 31,943 |
| 28 | 60 | 34 | 33,597 | 24,586 |
| 29 | 55 | 30 | 25,561 | 17,691 |
| 30 | 57 | 31 | 28,812 | 19,392 |
| 31 | 62 | 40 | 38,255 | 35,303 |
| 32 | 55 | 32 | 25,797 | 21,226 |
| 33 | 53 | 32 | 23,473 | 21,226 |
| 34 | 54 | 32 | 24,420 | 21,226 |
| 35 | 70 | 39 | 50,764 | 33,424 |

| | | | | |
|----|----|----|--------|--------|
| 36 | 59 | 28 | 31,263 | 14,177 |
| 37 | 57 | 32 | 27,858 | 21,226 |
| 38 | 58 | 33 | 29,536 | 23,106 |
| 39 | 58 | 32 | 28,879 | 21,226 |

Sumber : Hasil pengolahan data, 2017

Untuk melihat hasil jawaban responden dari hasil yang lebih rinci dapat dilihat pada lampiran, karena syarat untuk melakukan analisis regresi, datanya harus interval. Maka data ordinal tersebut diubah menjadi data interval dengan menggunakan *Software Microsoft Successive Interval* (MSI).

Pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan dinilai dengan menggunakan tabulasi dan kuesioner yang diterima 102 responden, yaitu sebagai berikut. :

b. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

Hasil uji statistik deskriptif akan diuraikan pada bagian ini. Variabel dalam penelitian 2 variabel, variabel X (bebas) yaitu variabel sistem pengendalian intern serta 1 (satu) variabel Y (terikat) yaitu variabel kualitas laporan keuangan. Variabel sistem pengendalian intern terdiri atas 14 pernyataan, variabel kualitas laporan keuangan terdiri atas 8 pernyataan.

1) Variabel Sistem Pengendalian Intern (X_1)

a) Lingkungan Pengendalian

Tabel IV.3
Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Variabel
Sistem Pengendalian Intern

| Keterangan | P1 | | P2 | | P3 | |
|----------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| | Σ | % | Σ | % | Σ | % |
| Sangat Setuju | 4 | 10,3% | 4 | 10,3% | 6 | 15,4 |
| Setuju | 35 | 89,7% | 35 | 89,7% | 12 | 30,8 |
| Kurang Setuju | - | | - | | 15 | 38,5 |
| Tidak Setuju | - | | - | | 6 | 15,4 |
| Jumlah | 39 | 100% | 39 | 100% | 39 | 100% |

Sumber : Hasil pengolahan data, 2017

Berdasarkan tabel IV.3 pernyataan pertama dengan indikator lingkungan pengendalian, yaitu : memelihara lingkungan pengendalian yang tercipta di instansi Pemerintah Kabupaten Sijunjung. Rata-rata responden menjawab Sebanyak 89,7% atau 35 responden menjawab setuju, itu artinya pemeliharaan dalam lingkungan instansi sangat diperlukan, agar pengendalian didalam instansi dapat berjalan dengan baik.

Pernyataan kedua pada tabel IV.3 dengan indikator lingkungan pengendalian, yaitu memelihara situasi kerja atau lingkungan pengendalian yang tercipta di instansi di pemerintah kabupaten sijunjung, rata-rata Sebanyak 89,7% atau 35 responden menjawab setuju, dan itu artinya pengendalian lingkungan didalam instansi diperlukan agar situasi kerja didalam instansi berjalan dengan kondusif.

Pernyataan ketiga pada tabel IV.3 dengan indikator peran aparat pengawas intern pemerintah (APIP) di lingkungan pemerintah kabupaten sijunjung memberi keyakinan atas ketaatan, kebenaran, dan pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi, rata-rata sebanyak 38,5% responden menjawab kurang setuju dan itu artinya peran aparat tidak perlu melakukan pengawasan intern dikarenakan mungkin dengan pengawasan aparat secara intern pegawai tidak bisa bebas dalam bekerja dan secara tidak sengaja merasa tertekan dalam bekerja.

b) Penilaian Risiko

Tabel IV.4
Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Variabel
Sistem Pengendalian Intern

| Keterangan | P1 | | P2 | | P3 | | P4 | |
|----------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| | Σ | % | Σ | % | Σ | % | Σ | % |
| Sangat Setuju | 8 | 20,5% | 6 | 15,4% | 5 | 12,8% | 8 | 20,5% |
| Setuju | 29 | 74,4% | 32 | 82,1% | 34 | 87,2% | 30 | 76,9% |
| Kurang Setuju | 1 | 2,6% | 1 | 2,6% | - | - | 1 | 2,6% |
| Tidak Setuju | 1 | 2,6% | - | - | - | - | - | - |
| Jumlah | 39 | 100% | 39 | 100% | 39 | 100% | 39 | 100% |

Sumber : Hasil pengolahan data, 2017

Berdasarkan tabel IV.4 pernyataan pertama dengan indikator penilaian risiko, yaitu : pimpinan instansi melakukan penilaian risiko dalam mencapai tujuan organisasi. Rata-rata sebanyak 74,4% atau 29 responden menjawab setuju, itu artinya pemimpin diharuskan penilaian disetiap perlakuan didalam instansi agar di dalam instansi tidak terjadi resiko yang tidak di inginkan serta dengan penilaian tersebut tujuan organisasi dapat tercapai.

Pernyataan kedua pada tabel IV.4 dengan indikator penilaian risiko, yaitu : identifikasi risiko dilakukan pimpinan saat ada pengeluaran yang tidak sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Rata-rata sebanyak 82,1% atau 32 responden menjawab setuju, itu artinya pemimpin juga diharuskan mengidentifikasi setiap pengeluaran anggaran pendapatan dan belanja daerah yang tidak sesuai dengan anggaran pendapatan agar tidak terjadinya sebuah risiko dan dengan menggunakan indentifikasi tersebut instansi dapat menstabilkan keuangan.

Pernyataan ketiga pada tabel IV.4 dengan indikator penilaian risiko, yaitu : identifikasi risiko dilakukan setelah analisis risiko atas belanja daerah. Rata-rata sebanyak 82,2% atau 34 responden menjawab setuju dan itu artinya analisis risiko setelah belanja daerah itu diperlukan identifikasi agar keuangan tetap stabil dan agar tidak terjadi pengeluaran yang tidap sesuai atau tidak diperlukan dalam belanja daerah

Pernyataan keempat pada tabel IV.4 dengan indikator penilaian risiko yaitu pegawai yang diberi wawenang dan tanggung jawab harus memahami penilaian risiko. Rata-rata sebanyak 76,9% atau 30 responden menjawab setuju dan itu artinya setiap pegawai SKPD yang diberi tanggung jawab dan wawenang harus mengerti dengan penilaian dan risiko agar tidak terjadinya kesalahan dalam bekerja.

c) Kegiatan Pengendalian

Tabel IV.5
Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Variabel
Sistem Pengendalian Intern

| Keterangan | P1 | | P2 | | P3 | |
|----------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| | Σ | % | Σ | % | Σ | % |
| Sangat Setuju | 14 | 35,9% | 7 | 17,9% | 6 | 15,4% |
| Setuju | 20 | 51,3% | 32 | 82,1% | 33 | 84,6% |
| Kurang Setuju | 4 | 10,3% | - | - | - | - |
| Tidak Setuju | 1 | 2,6% | - | - | - | - |
| Jumlah | 39 | 100% | 39 | 100% | 39 | 100% |

Sumber : Hasil pengolahan data, 2017

Berdasarkan tabel IV.5 pernyataan pertama dengan indikator kegiatan pengendalian, yaitu penyusunan struktur organisasi berpedoman pada peraturan. rata-rata sebanyak 51,3% atau 20 responden menjawab setuju, itu artinya dalam penyusunan organisasi tidak dibuat secara sembarangan, harus dibuat sesuai dengan peraturan yang ada, agar terlihat baik dan bisa dimengerti semua orang.

Pernyataan kedua pada tabel IV.5 dengan indikator kegiatan pengendalian, yaitu integritas dan etika sekurangnya dilakukan dengan menyusun dan menerapkan aturan perilaku, memberikan keteladanan perilaku, menegakan kedisiplinan yang tepat dan menghapus penguasaan yang dapat mendorong timbulnya perilaku tidak etis. Rata-rata sebanyak 82,1 % atau 32 responden menjawab setuju, dengan penghapusan sifat kuasa atau merasa jadi penguasa yang tidak penting bahkan menimbulkan perilaku tidak etis, lebih baik memberikan keteladanan perilaku, menegakan kedisiplinan dan menyusun dan menerapkan aturan perilaku yang baik.

Pernyataan ketiga pada tabel IV.5 dengan indikator kegiatan pengendalian, yaitu tidak terjadi review pemimpin atas kinerja instansi pemerintah. Rata-rata sebanyak 84,6 % atau 33 responden menjawab setuju, dan itu artinya dengan dilakukannya kegiatan pengendalian diharapkan tidak ada terjadinya review pemimpin atas kinerjanya, kecuali pemimpin berlakuan buruk dalam instansi.

d) Informasi dan Komunikasi

Tabel IV.6
Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Variabel
Sistem Pengendalian Intern

| Keterangan | P1 | | P2 | | P3 | |
|----------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| | Σ | % | Σ | % | Σ | % |
| Sangat Setuju | 6 | 15,4% | 6 | 15,4% | 4 | 10,3% |
| Setuju | 33 | 84,6% | 33 | 84,6% | 35 | 89,7% |
| Kurang Setuju | - | - | - | - | - | - |
| Tidak Setuju | - | - | - | - | - | - |
| Jumlah | 39 | 100% | 39 | 100% | 39 | 100% |

Sumber : Hasil pengolahan data, 2017

Berdasarkan tabel IV.6 pernyataan pertama dengan indikator informasi dan komunikasi, yaitu : pimpinan instansi wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk waktu yang tepat. Rata-rata sebanyak 84,6% atau 33 responden menjawab setuju, itu artinya pemimpin harus mengidentifikasi, mencatat, dan memberikan informasi dalam waktu secara tepat, dimaksudkan agar semua pegawai mengerti apa yang harus diperbuat.

Pernyataan kedua pada tabel IV.6 dengan indikator informasi dan komunikasi, yaitu hubungan baik yang terjalin antar instansi di pemerintah. Rata-rata sebanyak 84,6% atau 33 responden menjawab setuju, artinya disetiap instansi

atau antar instansi harus menjalin hubungan yang baik, itu dimaksudkan agar tercipta komunikasi yang baik dan menciptakan silaturahmi yang baik walau tidak dalam satu instansi.

Pernyataan ketiga pada tabel IV.6 dengan indikator informasi dan komunikasi, yaitu informasi dan komunikasi yang efektif diterapkan oleh pimpinan instansi pemerintah. Rata-rata sebanyak 89,7% atau 34 responden menjawab setuju, dan itu artinya pemimpin harus menciptakan informasi dan komunikasi yang efektif untuk diterapkan dalam instansi, supaya setiap orang didalam instansi tidak ada rasa malu dalam berkomunikasi.

e) Pemantauan

Tabel IV.7
Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Variabel
Sistem Pengendalian Intern

| Keterangan | P1 | |
|----------------------|-----------|-------------|
| | Σ | % |
| Sangat Setuju | 4 | 10,3% |
| Setuju | 34 | 87,2% |
| Kurang Setuju | - | - |
| Tidak Setuju | - | - |
| Jumlah | 39 | 100% |

Sumber : Hasil pengolahan data, 2017

Berdasarkan tabel IV.7 pernyataan pertama dengan indikator pemantauan, yaitu : dalam waktu yang tidak ditentukan pimpinan melakukan pemeriksaan mendadak terhadap catatan akuntansi. Rata-rata sebanyak 57,8% responden menjawab setuju, dan itu artinya pemimpin dapat mengerti dimana pegawai yang benar-benar bekerja

didalam instansi yang bertanggung jawab atas tugasnya walau sesekali tidak dipantau.

2) Variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y)

a) Relevan

Tabel IV.8
Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Variabel
Kualitas Laporan Keuangan

| Keterangan | P1 | | P2 | |
|----------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| | Σ | % | Σ | % |
| Sangat Setuju | 7 | 17,9% | 5 | 12,8% |
| Setuju | 28 | 71,8% | 34 | 87,2% |
| Kurang Setuju | 4 | 10,3% | - | - |
| Tidak Setuju | - | - | - | - |
| Jumlah | 39 | 100% | 39 | 100% |

Sumber : Hasil pengolahan data, 2017

Berdasarkan tabel IV.8 pernyataan pertama dengan indikator relevan, yaitu waktu penyajian laporan keuangan tidak ribet. Rata-rata sebanyak 71,8% atau 28 responden menjawab setuju, artinya dalam penyajian laporan keuangan yang relevan diharuskan laporan keuangan tidak ribet dan mudah dibaca dan menyajikan yang sesuai dengan tujuan.

Pernyataan kedua pada tabel IV.8 dengan indikator relevan, yaitu kelengkapan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Rata-rata sebesar 87,2 atau 34 responden menjawab setuju, itu artinya disetiap laporan keuangan yang relevan dalam pemerintahan harus mempunyai kelengkapan informasi yang baik serta memadai dan disaat ketika laporan itu disajikan kelengkapannya sudah terpenuhi dan bisa bermanfaat.

b) Andal

Tabel IV.9
Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Variabel
Kualitas Laporan Keuangan

| Keterangan | P1 | | P2 | | P3 | |
|----------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| | Σ | % | Σ | % | Σ | % |
| Sangat Setuju | 5 | 12,8% | 5 | 12,8% | 5 | 12,8% |
| Setuju | 30 | 76,9% | 33 | 84,6% | 31 | 79,5% |
| Kurang Setuju | 4 | 10,3% | 1 | 2,6% | 3 | 7,7% |
| Tidak Setuju | - | - | - | - | - | - |
| Jumlah | 39 | 100% | 39 | 100% | 39 | 100% |

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2017

Berdasarkan tabel IV.9 pernyataan pertama dengan indikator andal, yaitu informasi yang andal tergambar dalam laporan keuangan yang disajikan. Rata-rata sebanyak 76,9% atau 30 responden menjawab setuju, itu artinya informasi yang andal tidak hanya ada di dalam instansi atau diluar instansi tetapi juga bisa tergambar dari laporan keuangan yang disajikan, apakah instansi tersebut dalam keadaan baik atau tidak dan dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Pernyataan kedua pada tabel IV.9 dengan indikator andal, yaitu, laporan keuangan diuji oleh auditor lain (eksternal). Rata-rata sebanyak 84,6% atau 33 responden menjawab setuju, itu artinya laporan keuangan perlu diaudit atau di uji oleh auditor luar, agar bisa diketahui dimana letak kesalahan dalam laporan keuangan dan serta instansi tidak bisa menutup-nutupi kesalahan atau kelemahan laporan keuangan.

Pernyataan ketiga pada tabel IV.9 dengan indikator andal, yaitu : informasi yang disajikan dalam laporan keuangan mengandung netralitas.

Rata-rata sebanyak 79,5% atau 31 responden menjawab setuju, dan itu artinya laporan keuangan itu cukup netral, sesuai dengan ketentuan dan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan informasi pihak tertentu.

c) **Dapat Dibandingkan**

Tabel IV.10
Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Variabel
Kualitas Laporan Keuangan

| Keterangan | P1 | | P2 | |
|----------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| | Σ | % | Σ | % |
| Sangat Setuju | 4 | 10,3% | 5 | 12,8% |
| Setuju | 32 | 82,1% | 32 | 82,1% |
| Kurang Setuju | 3 | 7,7% | 2 | 5,1% |
| Tidak Setuju | - | - | - | - |
| Jumlah | 39 | 100% | 39 | 100% |

Sumber : Hasil pengolahan data, 2017

Berdasarkan tabel IV.10 pernyataan pertama dengan indikator dapat dibandingkan, yaitu, laporan keuangan yang disajikan dapat dibandingkan secara internal (dari tahun ketahun). Rata-rata sebanyak 82,1% atau 32 responden menjawab setuju, itu artinya laporan keuangan harus dapat dibandingkan dengan laporan keuangan pada periode sebelumnya, agar bisa diketahui didalam instansi tersebut mengalami kenaikan atau penurunan.

Pernyataan kedua pada tabel IV.10 dengan indikator dapat dibandingkan, yaitu : laporan keuangan yang disajikan dapat dibandingkan secara eksternal (antar SKPD). Rata-rata sebanyak 82,1% atau 32 responden menjawab setuju dan itu artinya agar bisa mengerti laporan keuangan

yang disajikan sudah baik atau masih buruk dalam penyajiannya, sehingga perlu dilakukan perbandingan seperti itu agar bisa dilihat kualitas penyajian laporan keuangan.

d) Dapat Dipahami

Tabel IV.11
Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Variabel
Kualitas Laporan Keuangan

| Keterangan | P1 | |
|----------------------|-----------|-------------|
| | Σ | % |
| Sangat Setuju | 4 | 10,3% |
| Setuju | 34 | 87,2% |
| Kurang Setuju | 1 | 2,6% |
| Tidak Setuju | - | - |
| Jumlah | 39 | 100% |

Sumber : Hasil pengolahan data, 2017

Berdasarkan tabel IV.11 pernyataan pertama dengan indikator dapat dipahami, yaitu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bentuk dan istilahnya dapat dipahami oleh para pengguna. Rata-rata sebanyak 87,2% atau 34 responden menjawab setuju dan itu artinya didalam setiap laporan keuangan dalam cara penyajiannya, baik bentuk atau istilahnya harus bisa dipahami oleh setiap umum, bukan hanya bisa dipahami oleh pihak-pihak tertentu saja tetapi juga untuk umum, agar laporan keuangan tersebut dapat berguna dan bermanfaat.

e) Pengujian Data Validitas Dan Reliabilitas

Pengujian data validitas dan reliabilitas sangat mempengaruhi data dari hasil penelitian. Agar hasil valid dan dapat dibuktikan, maka data yang akan dianalisis dan digunakan untuk menguji hipotesis harus merupakan

data yang valid dan reliabel. Sebelum dilakukan analisis, terlebih dahulu mengumpulkan data setelah itu diuji validitas dan reliabilitasnya. Uji validitas bertujuan menguji seberapa cermat suatu instrumen atau item-item dalam mengukur apa yang ingin diukur. Item kuesioner yang tidak valid berarti tidak dapat diukur. Sedangkan reliabilitas bertujuan untuk menguji konsistensi alat ukur sejauh mana suatu pengukuran relatif tidak berubah apabila pengukuran diulang dua kali atau lebih. Dengan kata lain reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan konsistensi suatu alat ukur dalam mengukur gejala yang sama.

1) Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya kuesioner yang digunakan. Teknik yang digunakan untuk melakukan uji validitas adalah koefisien korelasi *Pearson Correlation*. Data dikatakan valid jika total setiap konstruksinya signifikan pada level 0,05 atau 0,01. Hasil pengujian validitas dalam penelitian ini dapat terlihat pada tabel berikut:

a) Sistem Pengendalian Intern (x_1)

Hasil pengujian validitas dari pernyataan pada variabel sistem pengendalian intern sebagai berikut :

Tabel IV.12

Hasil pengujian validitas variabel Sistem Pengendalian Intern (X_1)

| Pernyataan | r_{hitung} | r_{tabel} | Keterangan |
|------------|--------------|-------------|------------|
| 1 | 0,448 | 0,349 | valid |
| 2 | 0,448 | 0,349 | valid |
| 3 | 0,477 | 0,349 | valid |

| | | | |
|----|-------|-------|-------------|
| 4 | 0,693 | 0,349 | valid |
| 5 | 0,530 | 0,349 | valid |
| 6 | 0,664 | 0,349 | valid |
| 7 | 0,561 | 0,349 | valid |
| 8 | 0,510 | 0,349 | valid |
| 9 | 0,505 | 0,349 | valid |
| 10 | 0,321 | 0,349 | Tidak valid |
| 11 | 0,565 | 0,349 | valid |
| 12 | 0,454 | 0,349 | valid |
| 13 | 0,448 | 0,349 | valid |
| 14 | 0,647 | 0,349 | valid |

Sumber : Data Primer Diolah, 2017

Berdasarkan hasil pengujian data validitas yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa 13 (tiga belas) pernyataan pada variabel sistem pengendalian intern semuanya dinyatakan valid dan 1 (satu diantaranya tidak valid).

b) Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Hasil pengujian validitas dari pernyataan pada variabel kualitas laporan keuangan sebagai berikut :

Tabel IV.13

Hasil pengujian validitas variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y)

| Pernyataan | r_{hitung} | r_{tabel} | Keterangan |
|------------|--------------|-------------|------------|
| 1 | 0,659 | 0,349 | valid |
| 2 | 0,734 | 0,349 | valid |
| 3 | 0,748 | 0,349 | valid |
| 4 | 0,635 | 0,349 | valid |
| 5 | 0,783 | 0,349 | valid |
| 6 | 0,561 | 0,349 | valid |
| 7 | 0,858 | 0,349 | valid |
| 8 | 0,516 | 0,349 | valid |

Sumber : Hasil pengolahan data, 2017

Berdasarkan hasil pengujian data validitas yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa 8 (delapan)

pernyataan pada variabel kualitas laporan keuangan semuanya dinyatakan valid.

2) Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas dilakukan terhadap pernyataan-pernyataan yang sudah dinyatakan valid untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran ulang pada kelompok yang sama dengan alat pengukuran yang sama. Dalam melakukan pengujian reliabilitas terdapat item-item pernyataan yang terdiri dari variabel akuntansi, sistem pengendalian intern (X_1) dan kualitas laporan keuangan (Y). Teknik statistik untuk pengujian tersebut menggunakan metode *Cronbach's Alpha* dengan menggunakan *software SPSS versi 20*. *Cronbach's Alpha* merupakan uji reliabilitas untuk alternatif jawaban lebih dari dua. Secara umum suatu instrumen dikatakan reliabel jika memiliki koefisien *Cronbach's Alpha* $>0,6$. Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada hasil pengolahan data, sebagai berikut :

Tabel IV.14
Hasil Uji Reliabilitas

| Variabel | <i>Cronbach's Alpha</i> | Nilai Standar <i>Cronbach's Alpha</i> | Keterangan |
|----------|-------------------------|--|------------|
| X_1 | 0,750 | 0,6 | Reliabel |
| Y | 0,837 | 0,6 | Reliabel |

Sumber : Hasil pengolahan data, 2017

Berdasarkan tabel IV.14 menunjukkan bahwa hasil pengujian reliabilitas untuk variabel sistem pengendalian intern (X_1), kualitas laporan keuangan (Y) dapat dinyatakan reliabel karena memiliki

Cronbach's Alpha > 0,6. Berarti semua butir pernyataan dalam variabel tersebut dapat digunakan lebih dari satu kali dengan alat pengukuran yang sama.

f) Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan analisis data maka data harus diuji sesuai asumsi klasik yang bertujuan untuk mendapatkan regresi yang baik yang terbebas dari ketidaknormalan regresi, autokorelasi, dan heterokedastisitas.

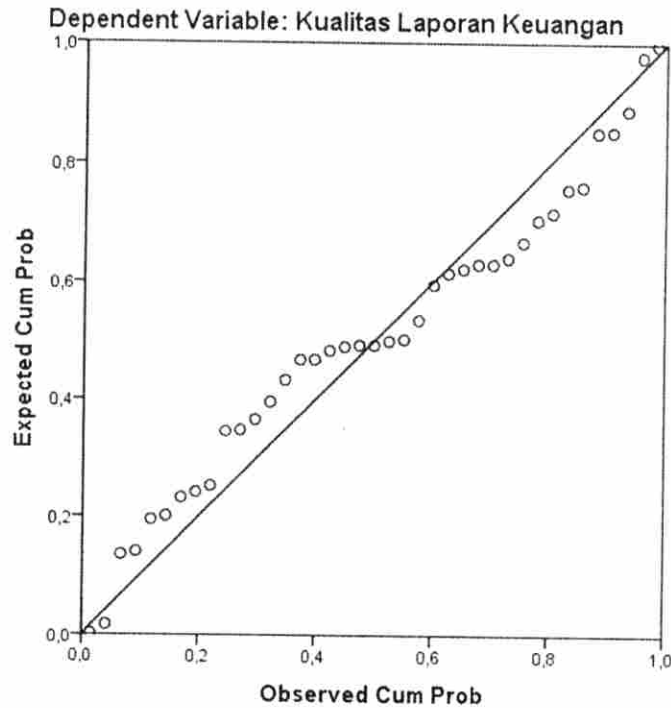
1) Uji Normalitas

Uji normalitas data digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal. Uji normalitas untuk penelitian ini menggunakan analisis grafik normal *P-P plot*. Dasar pengambilan keputusan untuk uji normalitas, yaitu :

- a) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas,
- b) Jika data menyebar jauh dari diagonal atau tidak mengikuti garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Tabel IV.15
Uji Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber : Hasil pengolahan data, 2017

Berdasarkan gambar IV.15 menunjukkan bahwa grafik normal *P-P plot* terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal (tidak terpenjar jauh dari garis lurus) dan mengikuti arah garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut normal. Jadi model regresi ini layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas

2) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi merupakan pengujian dalam regresi yaitu nilai dari variabel dependen tidak berpengaruh terhadap nilai variabel itu sendiri. Untuk mendeteksi gejala autokorelasi dapat

menggunakan uji *Darbin Watson (DW)* dengan ketentuan DW jika berkisar antara -2 sampai +2 menunjukkan bahwa tidak terjadi autokorelasi. Uji *Darbin Watson* penelitian ini dibantu dengan *SPSS for window versi 20* dengan hasil sebagai berikut :

Tabel IV.16
Hasil pengujian autokorelasi
Model Summary^D

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin Watson |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | ,696 ^a | ,484 | ,470 | 3,01098 | 1,870 |

Sumber : Hasil pengolahan data, 2017

Berdasarkan tabel IV.16 nilai DurbinWatson pada penelitian ini yaitu sebesar 1,870 berkisar antara -2 sampai +2 yang berarti tidak terjadi autokorelasi.

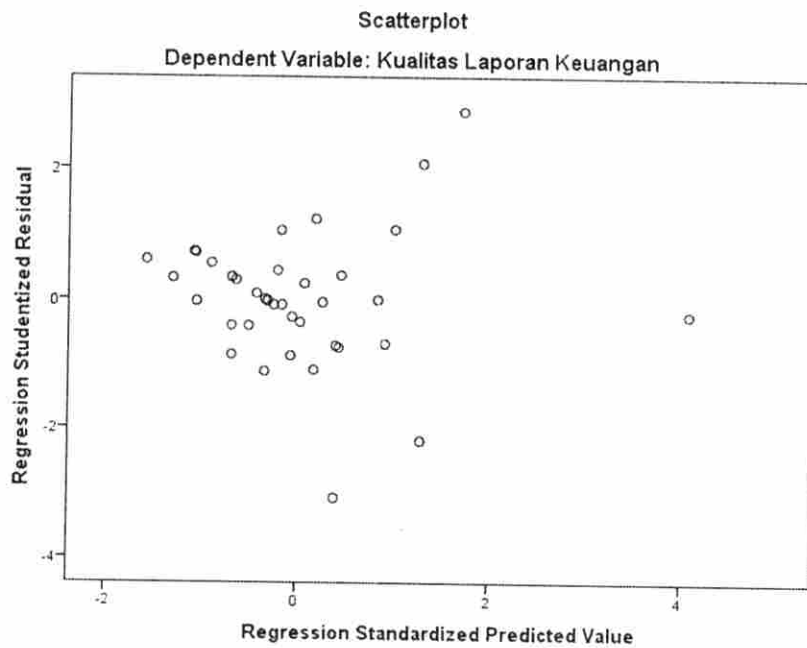
3) Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan *variansi* dari residual suatu pengamatan yang lain tetap disebut hemokedastisitas, sedangkan untuk *varians* yang berbeda disebut heterokedastisitas. Dalam melakukan uji heterokedastisitas untuk penelitian, peneliti menggunakan uji *scaller plot*. Dasar pengambilan keputusan untuk uji heterokedastisitas dengan melihat *scaller plot*, yaitu :

- (a) Jika suatu pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebur kemudian menyempit), maka terjadi heterokedastisitas.

(b) Jika tidak ada polayang jelas seperti titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas

Gambar IV.17
Hasil Output SPSS
Uji Heterokedastisitas (normal P-P plot)



Sumber : Hasil pengolahan data, 2017

Berdasarkan gambar IV.17 menunjukkan bahwa data tersebar disekitar titik-titik nol dan tidak ada pola yang jelas pada penyebaran titik-titik diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas dalam penelitian ini.

g) Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa besar kemampuan model menentukan proporsi atau persentase total variasi

dalam variabel dependen. Nilai koefisien determinasi berada 0 sampai 1. Jika nilai *R Square* mendekati 0, berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Jika nilai *R Square* mendekati 1, berarti kemampuan variabel-variabel independen dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Dari hasil pengolahan data dengan menggunakan *SPSS for window versi 20* diperoleh *R Square* sebagai berikut:

Tabel IV.18
Koefisien Determinan

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1 | ,696 ^a | ,484 | ,470 | 3,01098 |

Sumber: Hasil pengolahan data, 2017

Menurut Sugiyono pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi sebagai berikut:

0,00 - 0,199 = sangat rendah

0,20 - 0,399 = rendah

0,40 - 0,599 = sedang

0,60 - 0,799 = kuat

0,80 - 1,000 = sangat kuat

Berdasarkan tabel IV.18 diperoleh *R Square* sebesar 0,484 atau 48,4%. Hasil ini berarti 48,4% variabel kualitas laporan keuangan dipengaruhi sistem pengendalian intern cukup baik, sedangkan 51,6% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Hal ini menggambarkan bahwa penelitian mengenai sistem pengendalian intern dapat dijadikan model penelitian selanjutnya.

h) Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi linear sederhanadidasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen.. Sebelum dilakukan uji hipotesis mengenai signifikan antara hubungan variabel bebas dan variabel terikat, maka terlebih dahulu harus diketahui apakah sebuah model regresi memiliki hubungan yang linear. Setelah melakukan uji regresi dengan *SPSS for window versi 20* maka hasil yang didapat bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.19
Hasil Uji Regresi Linear Sederhana

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. | Collinearity Statistics | |
|------------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|-------------------------|-------|
| | B | Std. Error | Beta | | | Tolerance | VIF |
| (Constant) | 6,310 | 2,737 | | 2,305 | ,027 | | |
| 1 Sistem Pengendalian Intern | ,544 | ,092 | ,696 | 5,893 | ,000 | 1,000 | 1,000 |

Sumber: Hasil pengolahan data, 2017

Berdasarkan tabel IV.19 hasil regresi linear sederhana menunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian intern (X_1), terhadap kualitas laporan keuangan (Y) dapat digambarkan persamaan regresi sederhana sebagai berikut :

$$Y = a + bX_1$$

$$Y = 6,310 + 0,544X$$

Dari persamaan tersebut menggambarkan bahwa

Nilai koefisien regresi sistem pengendalian intern (X_1) terhadap kualitas laporan keuangan (Y) adalah sebesar 0,544 (54,4%), berarti sistem pengendalian intern (X_1) memiliki hubungan terhadap kualitas laporan keuangan (Y) sebesar 54,4% artinya jika ada kenaikan sistem pengendalian intern 100% maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan sebesar 54,4%, sebaliknya jika ada penurunan sistem pengendalian intern sebesar 100% maka akan menurunkan kualitas laporan keuangan (Y) sebesar 54,4 %.

i) Uji Hipotesis Secara Parsial atau Individual (Uji t)

Untuk dapat menjawab permasalahan bagaimanakah pengaruh sistem pengendalian intern secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan, maka hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut ini: :

Tabel IV.20
Hasil Uji t

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|---|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| (Constant) | 6,310 | 2,737 | | 2,305 | ,027 |
| ¹ Sistem Pengendalian Intern | ,544 | ,092 | ,696 | 5,893 | ,000 |

Sumber: Hasil pengolahan data, 2017

Berdasarkan tabel IV.20 hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} untuk variabel sistem pengendalian intern (X_1) terhadap kualitas laporan keuangan (Y) sebesar 5,893 sedangkan nilai t_{tabel} dengan taraf signifikan (α) = 5% dan derajat kebebasan (df) = $n-k-1 = (39-2-1)$ adalah sebesar 1,68830. Diketahui $t_{hitung} > t_{tabel}$ (**5,893 > 1,68830**). Hal ini berarti secara parsial sistem pengendalian intern

berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Secara parsial berdasarkan tabel IV.26 dapat dibahas sebagai berikut:

(1) Sistem pengendalian intern

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} untuk variabel sistem pengendalian intern (X_1) terhadap kualitas laporan keuangan (Y) sebesar 5,893, sedangkan nilai t_{tabel} dengan taraf signifikan (α) = 5% dan derajat kebebasan (df) = $n-k-1 = (39-2)$ adalah sebesar 1,68830. Diketahui $t_{hitung} > t_{tabel}$ (**5,893 > 1,68830**) dan nilai signifikan $0,000 < 0,05$. Hasil uji t pada sistem pengendalian intern menunjukkan bahwa akuntansi berbasis akrual berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sijunjung

Hal ini berkaitan dapat memberi keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari kualitas laporan keuangan melalui sistem pengendalian intern, maka semakin baik sistem pengendalian intern pemerintah, semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah.

Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan Tuti Herawati (2014) sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Cianjur.

B. Pembahasan

1. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern (X1) dengan Kualitas Laporan Keuangan (Y) Pemerintah Daerah

Setelah melakukan penelitian pada pemerintah Kabupaten Sijunjung, penulis dapat membahas mengenai variabel yang diteliti. Berdasarkan pernyataan responden, sistem pengendalian intern dilaksanakan dengan cukup baik oleh pemerintah Kabupaten Sijunjung, terlihat dari setiap unsur sistem pengendalian intern yaitu unsur lingkungan pengendalian, informasi dan komunikasi penilaian risiko, dan pemantauan telah dilaksanakan sesuai dengan yang undang-undang dan peraturan yang ditetapkan.

Pengujian statistik menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern signifikan dan positif memengaruhi kualitas laporan keuangan. Sistem pengendalian intern adalah hal yang harus selalu dilakukan oleh pemerintah, sesuai dengan yang diungkapkan oleh Mahmudi (2010: 29) untuk dapat menghasilkan laporan yang berkualitas pemerintah daerah diperlukan proses dan tahap-tahap yang harus dilalui yang diatur dalam sistem akuntansi pemerintah daerah, sistem akuntansi didalamnya mengatur tentang sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), kualitas laporan keuangan dipengaruhi bagus tidaknya sistem pengendalian pemerintah.

Melalui sistem pengendalian intern dapat memberi keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah, hal ini

menunjukkan semakin baik pelaksanaan sistem pengendalian intern maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan

Berdasarkan hasil uji parsial menunjukkan bahwa nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ untuk variabel sistem pengendalian intern (X_1) terhadap kualitas laporan keuangan (Y), sedangkan nilai t_{tabel} dengan taraf signifikan (α) = 5% dan derajat kebebasan (df) = $n-k-1 = (39-2-1)$ adalah sebesar 1,68830. Diketahui $t_{hitung} > t_{tabel}$ (**5,893 > 1,68830**) dan nilai signifikan $0,000 < 0,05$. Hasil uji t pada sistem pengendalian intern mempengaruhi secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sijunjung.

Menurut di dalam teori Langkah-langkah dalam uji hipotesis secara persial atau individual yaitu:

e. Merumuskan Hipotesis

H_0 : keahlian audit dalam dan independensi auditor tidak berpengaruh terhadap pemberian pendapat auditor secara persial/individual.

H_a : keahlian audit dan independensi auditor berpengaruh terhadap pemberian pendapat auditor secara persial/individual.

b. Menentukan Tarif Nyata

Tingkat signifikan sebesar 5%, taraf nyata dari t tabel ditentukan dari derajat bebas (df) = $n-k-1$, taraf nyata (α) berarti

nilai t tabel, taraf nyata dari F tabel ditentukan dengan derajat bebas (db) = $n-k-1$.

- c. H_0 ditolak apabila t hitung $>$ t tabel, H_a diterima apabila t hitung $<$ t tabel. Berdasarkan probabilitas: H_0 ditolak jika P value $<$ 5% H_0 diterima jika P value $>$ 5%.

d. Kesimpulan

Menarik kesimpulan H_0 ditolak apabila t hitung $>$ t tabel atau H_a diterima apabila t hitung $<$ t tabel, artinya jika H_0 di tolak terdapat pengaruh.

Maka di dalam penelitian ini sistem pengendalian intern berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, itu telah dibuktikan didalam tabel dimana Diketahui $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan itu berarti H_0 ditolak dan jika H_0 ditolak berarti mempengaruhi dannilai signifikan $0,000 < 0,05$ Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dikemukakan Tuti Herawati (2014) sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Cianjur.

BAB V

Simpulan dan Saran

A. Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung. Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sijunjung. Artinya bahwa, semakin baik pelaksanaan unsur SPIP maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan, dapat dikemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi instansi yang terkait maupun bagi pihak-pihak lain. Adapun saran yang diberikan, antara lain

1. Pada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa variabel yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan adalah sistem pengendalian intern dimana $t_{hitung} > t_{tabel}$, berdasarkan latar belakang masalah tidak wajarnya pelaporan keuangan pemerintah disebabkan oleh adanya kelemahan sistem pengendalian intern, penyajian laporan keuangan yang belum sesuai dengan SAP serta kelemahan dalam sistem penyusunan laporan keuangan. Maka untuk dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah sebaiknya pemerintah Kabupaten

Sijunjung memperbaiki sistem pengendalian intern, penyajian laporan keuangan sesuai dengan SAP dan undang-undang PP nomor 71 tahun 2101 serta memperhatikan para pegawai sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi sehingga paham terhadap sistem atau standar yang telah ditetapkan oleh peraturan undang-undang nomor 71 tahun 2010 dan SAP.

2. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk bisa mendapatkan data secara keseluruhan dari semua dinas/badan/kantor yang ada, agar hasil yang didapat lebih maksimal

DAFTAR PUSTAKA

- Antarasumbar.com. 16 Juni 2016. *Hasil pemeriksaan BPK kota sawahlunto*, hlm.Utama. (online), (<http://www.antarasumbar.com/berita/179646>, diakses 16 Juni 2016)
- Bastian, Indra.2009. *Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia* .BPF. Yogyakarta
- Darise, Nurlan. 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta : PT. Indeks
- Diandra, Rayandita. 2015. *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*. *Jurnal TA*. <http://www.kompasiana.com>
- Gosumbar.com. 29 Mei 2016. *Hasil pemeriksaan BPK, Pemko Padang Pertahankan Opini WTP*, hlm.Utama. (online), (<http://www.gosumbar.com/berita/baca/2016>, diakses 29 Mei 2016)
- Herawati,Tuti.2014. *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan(Survei Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemda Cianjur)*www.stiestembi.ac.id.Bandung:STIE STEMBI
- Iqbal, Hasan. 2004. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistika*. PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Madjam,Anggraeni,dkk.2014.*Jurnal Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara (Studi Kasus Pada Dppkad Kabupaten Gorontalo Utara)* www.acedemia.edu/23358184/. Gorontalo:Universitas Negeri Gorontalo
- Mahmudi. 2010. *Analisa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Kedua*. UPP STIM YPKN. Yogyakarta,*Sektor Publik*.
- Mustika, Febrina. 2011. *Peranan Audit Internal Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Melalui Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Intervening*. Skripsi UPI.
- Rifkypernanda,Pakaya.2011. *Pengaruh Dinemsi Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Daerah*.Skripsi FEB.UNG.
- Ranah berita.com. 04 Juni 2013. *Penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan untuk 17 Kabupaten di sumatera barat*, hlm.Utama. (online), (<http://www.news.ranahweb.com>, diakses 4 Juni 2013)

- Situs Resmi Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Sumatera barat* (2015) Padang: BPK. (online), (<http://padang.bpk.go.id/%3Fp%3D6153>, diakses 31 Maret 2016)
- Situs Resmi Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Sumatera barat* (2015) Padang: BPK. (online), (<http://padang.bpk.go.id/%3Fp%3D6217>, diakses 01 Juli 2016)
- Sugiyono.2005.*Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono.2011.*Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Tuti Herawati. (2014). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemda Cianjur). *Jurnal STAR (Study & Accounting Research)*. (online), Vol XI. No 1 ISSN1693-4482 ([http://JurnalSTAR\(Study&AccountingResearch\)/14626/](http://JurnalSTAR(Study&AccountingResearch)/14626/), diakses 23 (Oktober 2016)
- Padangpanjang.go.id. 22 Mei 2014. *Opini LKPD*, hal. Utama.(online), (<http://Padangpanjang.go.id/pp/wp-content>, diakses 22 Mei 2014
- PP No.71. 2010.*SAP*
- Zulkifli,Armada.2013.*Pengelolaan Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Berdasarkan Pp No.71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*<http://catatanpamong.blogspot.co.id/2013/09/pengelolaan-dan-pelaporan-keuangan.html>.

BIODATA PENULIS

Nama : **Edi Kurniawan (Odi K)**

Nim : **222013261**

Fakultas : **Ekonomi**

Jurusan : **Akuntansi**

Tempat Tgl Lahir : **Cahaya Maju, 21 Januari 1996**

Alamat : **Jln Inspektur Marzuki, Lorong Keluarga, Perumahan
Redarigenci, Pakjo**

No Hp : **081278418968**

Orang Tua : **1. Rafles**
2. Tuti Daryati

Pendidikan : **SD Negeri 3 Cahaya Maju**
SMP Negeri 1 Lempuing Oki
SMA Negeri 1 Lempuing Oki
Universitas Muhammadiyah Palembang

Pembimbing

Skripsi : **Mizan, S.E.,M.Si.,Ak.,Ca**

Akademik : **Lis Djuniar, S.E.,M.Si**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

AKREDITASI

INSTITUSI PERGURUAN TINGGI
PROGRAM STUDI MANAJEMEN (S1)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI (S1)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PEMASARAN (D3)

Nomor : 027 /SK/BAN-PT/Akred /PT/ / 2014 (B)
Nomor : 044 /SK/BAN-PT/Akred /SI/ / 2014 (B)
Nomor : 1262 /SK/BAN-PT/Akred/SI/II/ 2015 (B)
Nomor : 771 /SK/BAN-PT/Akred/Dpt-III/VI/ 2015 (B)

ite : fe.unpalembang.ac.id

Email : febumpg@unpalembang.ac.i

Alamat : Jalan Jendral Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263 Telp. (0711)511433 Faximile (0711)518018



LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Hari/Tanggal : Jum'at, 24 Februari 2017
Waktu : 08.00 s/d 12.00 WIB
Nama : Edi Kurniawan
Nim : 222013261
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Pemeriksaan Akuntansi
Judul Skripsi : PENGARUH KUALITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG (Studi Kasus BKAD Kabupaten Sijunjung)

TELAH DIPERBAIKI DAN DIPERSETUJUI OLEH TIM PENGUJI DAN PEMBIMBING SKRIPSI DAN DIPERKENANKAN UNTUK MENGIKUTI WISUDA

| NO | NAMA DOSEN | JABATAN | TANGGAL PERSETUJUAN | TANDA TANGAN |
|----|--|---------------|---------------------|--------------|
| 1 | Mizan, S.E, M.Si., Ak, CA | Pembimbing | 10/3 2017. | |
| 2 | H.M. Basyaruddin R, S.E, Ak., M.Si, CA | Ketua Penguji | 9/3 2017. | |
| 3 | Mizan, S.E, M.Si., Ak, CA | Penguji I | 7/3 2017 | |
| 4 | Lis Djuniar, S.E, M.Si | Penguji II | 6-3-2017 | |

Palembang, Maret 2017

Dekan

u b Ketua Program Studi Akuntansi



Betri Sirajuddin, SE, M.Si., Ak., CA
NIDN/NBM:0216106902/944806



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : **Edi Kurniawan**

PEMBIMBING : **Mizan, SE, M.Si., Ak., CA**

NIM : **222013261**

KETUA :

PROGRAM STUDI : **Akuntansi**

ANGGOTA :

JUDUL SKRIPSI : **Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sijunjung**

| NO. | TGL/BLN/TH KONSULTASI | MATERI YANG DIBAHAS | PARAF PEMBIMBING | | KETERANGAN |
|-----|-----------------------|---------------------|------------------|---------|-----------------------|
| | | | KETUA | ANGGOTA | |
| 1. | 7/2 2017 | BAB I 5/2 IV | | | Perbaikan |
| 2. | | | | | Mr Meyanda |
| 3. | | | | | Meningkatkan kualitas |
| 4. | | | | | |
| 5. | 8/2 2017 | BAB I 5/2 IV | | | Perbaikan dan |
| 6. | | | | | balasan |
| 7. | | | | | |
| 8. | 9/2 2017 | BAB I 5/2 IV | | | Perbaikan lagi |
| 9. | | | | | dan dan |
| 10. | | | | | |
| 11. | 10/2 2017 | Skripsi | | | See |
| 12. | | | | | |
| 13. | | | | | |
| 14. | | | | | |
| 15. | | | | | |
| 16. | | | | | |

CATATAN :

Mahasiswa diberikan waktu menyelesaikan skripsi, 6 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Palembang

Pada tanggal : / /

a.n. Dekan

Program Studi :

Betri Sirajuddin, SE, M.Si., Ak., CA





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. Jend. Ahmad Yani 13 Ulu Palembang (30263) Telp. 0711 - 513022 Fax. 0711 - 513078

Wb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Edi Kurniawan
 NIM : 22 2013 261
 Fakultas : Ekonomi
 Jurusan : AKuntansi
 Alamat : Jln. Inspektur Marzuki, Pak10, Palembang.

Telah melunasi seluruh Pembayaran Uang BPP dari Semester Pertama sampai dengan Semester Terakhir Ganjil/Genap tahun 16/17 w.
Wisuda (suam puluh dua)

Demikian Surat Keterangan ini dipergunakan untuk mengikuti Ujian Komprehensif, Daftar Wisuda dan Pengambilan Ijazah di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Mengetahui
 Wakil Rektor II,
 Bro. Kurniawan

tdg 4/2/17

Palembang, 10-02-17
 Bagian BPP, PR

(.....)

(.....)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
LEMBAGA BAHASA

Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263

Telp. (0711) 512637 - Fax. (0711) 512637

email: lembasabahasauamp@yahoo.com.id



TEST OF ENGLISH ABILITY SCORE RECORD

| | | |
|---------------------|---|--------------------------------|
| Name | : | Edi Kurniawan |
| Place/Date of Birth | : | Cahaya Maju, January 21st 1996 |
| Test Times Taken | : | +3 |
| Test Date | : | March, 04th 2017 |

Scaled Score

| | | |
|-------------------------|---|------------|
| Listening Comprehension | : | 42 |
| Structure Grammar | : | 39 |
| Reading Comprehension | : | 39 |
| OVERALL SCORE | : | 400 |

Palembang, March, 06th 2017
Chairperson of Language Institute
A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Rini Sasanti'.

Rini Sasanti, S.Pd., M.A.

NBM/NIDN. 1164932/0210098402

No. 571/TEA FE/LB/UM/P/II/2017

22222222222222

Umur :

Pendidikan :

Jenis Kelamin :

Jabatan :

| No | Pertanyaan | SS | S | KS | TS |
|----|---|----|---|----|----|
| | Variabel X sistem pengendalian Intern | | | | |
| | a. Indikator Lingkungan Pengendalian | | | | |
| 1 | Tidak ada komitmen dari anggota instansi di lingkungan pengendalian dipemerintah kabupaten sijunjung | | | | |
| 2 | Memelihara situasi kerja atau lingkungan pengendalian yang tercipta di instansi di pemerintah kabupaten sijunjung | | | | |
| 3 | Peran aparat pengawas intern pemerintah (APIP) di lingkungan pemerintah kabupaten sijunjung memberi keyakinan atas ketaatan, kebenaran, dan pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi | | | | |
| | b. Indikator Penilaian Resiko | | | | |
| 4 | Pimpinan instansi melakukan penilaian resiko dalam mencapai tujuan organisasi yang diwujudkan dalam belanja daerah | | | | |
| 5 | Identifikasi resiko dilakukan pimpinan saat ada pengeluaran atau pendapatan yang tidak sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) | | | | |
| 6 | Identifikasi resiko dilakukan pimpinan saat ada pengeluaran atau pendapatan yang tidak sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) | | | | |
| 7 | Pegawai yang diberi wewenang dan tanggung jawab memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait SPIP | | | | |
| | c. Indikator Kegiatan Pengendalian | | | | |
| 8 | Penyusunan struktur organisasi berpedoman pada peraturan undang-undang | | | | |
| 9 | Integritas dan etika sekurangnya dilakukan dengan menyusun dan menerapkan aturan perilaku, memberikan keteladanan perilaku, menegakan kedisiplinan yang tepat dan menghapus penguasaan yang tepat mendorong timbulnya perilaku tidak etis | | | | |
| 10 | Tidak terjadi review pemimpin atas kinerja instansi pemerintah kabupaten sijunjung | | | | |
| | d. Indikator Informasi dan Komunikasi | | | | |
| 11 | Pemimpin instansi wajib mengidentifikasi ,mencatat dan mengkomunikasikan informasi yang tepat | | | | |
| 12 | Hubungan baik yang terjalin antar instansi di pemerintah kabupaten sijunjung | | | | |
| 13 | Informasi dan komunikasi yang efektif diterapkan oleh pimpinan instansi pemerintah | | | | |
| | e. Indikator Pemantauan | | | | |
| 14 | Dalam waktu yang tidak ditentukan pimpinan melakukan pemeriksaan mendadak terhadap catatan akuntansi | | | | |

| Variabel Y Kualitas Laporan Keuangan | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| a. Indikator Relevan | | | | | |
| 1 | Waktu penyajian laporan keuangan tidak ribet | | | | |
| 2 | Kelengkapan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan oleh pemerintah | | | | |
| b. Indikator andal | | | | | |
| 3 | Informasi yang andal tergambar dalam laporan keuangan yang disajikan | | | | |
| 4 | Laporan Keuangan diuji oleh auditor lain (eksternal) | | | | |
| 5 | Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan mengandung netralisir | | | | |
| c. Indikator Dapat Dibandingkan | | | | | |
| 6 | Laporan keuangan yang disajikan dapat dibandingkan secara internal (dari tahun ke tahun) | | | | |
| 7 | Laporan keuangan yang disajikan dapat dibandingkan secara eksternal (antar SKPD) | | | | |
| d. Indikator Dapat Dipahami | | | | | |
| 8 | Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bentuk dan istilah nya dapat dipahami oleh para pengguna | | | | |

Keterangan : SS : Sangat Setuju

S : Setuju

KS : Kurang Setuju

TS : Tidak Setuju



PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jln. Prof. M.Yamin, SH No. 17 – Telp. (0754) 20010 Fax. (0754)20223
MUARO SIJUNJUNG 27511
Website : <http://www.sijunjung.go.id> email : pdet@sijunjung.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 004/130/Sekr-BKAD- 2017

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JAHERI, S.Sos.M.Si
NIP : 19730311 199303 1 004
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama Muda / IV.c
Jabatan : Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah
Alamat : Kabupaten Sijunjung

Dengan ini menerangkan , bahwa nama tersebut dibawah ini

Nama : EDI KURNIAWAN
NIM : 222013261
Tempat / Tgl Lahir : Cahya Maju / 21 Januari 1996

Telah melaksanakan penelitian di Badan Keuangan dan Aset Daerah. Jln.Prof.Moh. Yamin, SH Muaro Sijunjung tanggal 13 Februari 2017.
Selama melakukan penelitian yang bersangkutan telah menunjukkan kemampuan, kerja sama dan perilaku yang baik

Demikian surat keterangan ini di buat untuk bisa dipergunakan sebagaimana mestinya.

Muaro Sijunjung, 13 Februari 2017
Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kab Sijunjung



JAHERI S.Sos.M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19730311 199303 1 004



LABORATORIUM KOMPUTER

Nomor : 043/PAK / LAB. FE UMP/VIII / 2014

Diberikan Kepada :

N a m a : EDI KURNIAWAN

N i m : 222013261

Tempat Lahir : CAHYA MAJU

Tanggal Lahir : 21 JANUARI 1996

Nilai : 80 A SANGAT MEMUASKAN

Peserta Pelatihan Komputer Windows, Microsoft Word dan Microsoft Excel yang dilaksanakan dari bulan SEPTEMBER 2013 sampai dengan bulan DESEMBER 2013 (14 Kali: 28 Jam) bertempat di Laboratorium Komputer Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang

Palembang FEBRUARI 2014

Dekan

ABID DIAZULI. SE, MM





LABORATORIUM KOMPUTER

Nomor : 023/PAK/LAB..FE UMP/II/12015

Diberikan Kepada :

N a m a : EDI KURNIAWAN

N i m : 222013261

Tempat Lahir : CAHYA MAJU

Tanggal Lahir : 21 JANUARI 1996

Nilai :

| | | |
|----|---|-----------|
| 70 | B | MENUASKAN |
|----|---|-----------|

Peserta Pelatihan Komputer Akuntansi : GENERAL LEDGER EXCEL DAN MYOB FOR ACCOUNTING, yang dilaksanakan dari bulan September 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 16 Kali : 30 Jam) di Laboratorium Komputer Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang

Palembang JANUARI 2015

Dekan

Abid Djazuli. SE, MM





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
STATUS TERAKREDITASI



PALEMBANG

No. 118/H-4/LPKKN/UMP/XI/2016

Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang menerangkan bahwa:

Nama : EDI KURNIAWAN
Nomor Pokok Mahasiswa : 222013261
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS
Tempat Tgl. Lahir : CAHYA MAJU, 21-01-1996

telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata Tematik Posdaya Angkatan ke-11 yang dilaksanakan dari tanggal 20 Juli sampai dengan 3 September 2016 bertempat di:

Kelurahan/Desa : PLAJU ILIR
Kecamatan : PLAJU
Kota/Kabupaten : PALEMBANG
Dinyatakan : Lulus

Palembang, 17 September 2016
Rektor,



Edi Kurniawan
Rektor
NBM/NIDN. 743462/0230106301



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

Unggul dan Tolami

Sertifikat

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

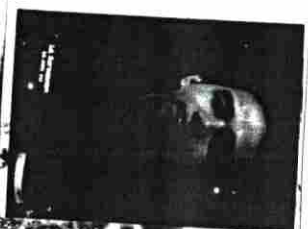
DIBERIKAN KEPADA :

NAMA : EDY KURNIAWAN
NIM : 222013261
PROGRAM STUDI : Akuntansi

Yang dinyatakan **HAFAL / TAHFIDZ (25)** Surat Juz Amma
di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang

Palembang, 2016, 22 سبتمبر, الخميس,
an, Dekan

Wakil Dekan IV



Muhammad Ariadi, S.Ag., M.Hum
NBM/IDN : 731454/0215126902





DAFTAR NILAI

NAMA : EDY KURNIAWAN

NIM : 222013261

| NÖ | NAMA SURAT | TAHFIDZ | FASIKH | TAJWID | JUMLAH |
|-----------|-------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | AL-ASHR | 60 | 20 | 10 | 90 |
| 2 | AL-HUMAZAH | 60 | 10 | 15 | 85 |
| 3 | AL-FIIL | 60 | 10 | 15 | 85 |
| 4 | QURAI SY | 60 | 10 | 15 | 85 |
| 5 | AL-MA'UN | 60 | 10 | 15 | 85 |
| 6 | AL-KAUTSAR | 60 | 10 | 15 | 85 |
| 7 | AL-KAFIRUN | 60 | 10 | 10 | 80 |
| 8 | AN-NASHR | 60 | 20 | 15 | 95 |
| 9 | AL-LAHAB | 60 | 10 | 15 | 85 |
| 10 | AL-IKHLAS | 60 | 10 | 15 | 85 |
| 11 | AL-FALAQ | 60 | 15 | 10 | 85 |
| 12 | AN-NAS | 60 | 20 | 15 | 95 |
| 13 | AD-DHUHA | 10 | 60 | 10 | 80 |
| 14 | AL-INSYIRAH | 10 | 60 | 10 | 80 |
| 15 | AL-TIIN | 10 | 60 | 10 | 80 |
| 16 | AL-ALAQ | 10 | 60 | 10 | 80 |
| 17 | AL-QADAR | 10 | 60 | 10 | 80 |
| 18 | AL-BAIYINAH | 10 | 60 | 10 | 80 |
| 19 | AL-ZALZALAH | 10 | 60 | 10 | 80 |
| 20 | AL-ADIYAH | 10 | 60 | 10 | 80 |
| 21 | AL-QARI'AH | 10 | 60 | 10 | 80 |
| 22 | AL-TAKATSUR | 10 | 60 | 10 | 80 |
| 23 | AL-BALAD | 10 | 60 | 10 | 80 |
| 24 | AL-SYAMS | 10 | 60 | 10 | 80 |
| 25 | AL-LAIL | 10 | 60 | 10 | 80 |